



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 26 TAHUN 2020  
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dengan telah disusunnya rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 62);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 62) dilakukan penambahan Lampiran yaitu Lampiran III dan Lampiran IV sebagai berikut :

- a. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Kabupaten Sambas Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sambas Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Kabupaten Sambas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sambas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 5 April 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 5 April 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004



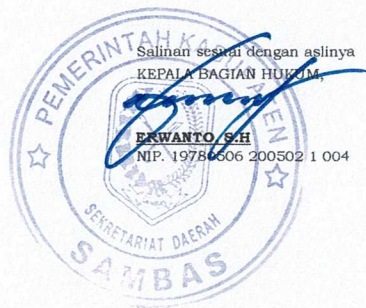
LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 19 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI  
 BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023

| No  | Kegiatan Utama  | Indikator KU  | Target Tahun 2023 | Rencana Aksi   | Output                                  |  | Target                                       |       |        |       |       | Jumlah Anggaran |             |             |             |                   | Unit/Satuan Kerja Pelaksana |                   |                   |
|---|---|---|-------------------|--|---|--|--|-------|--------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |   |                   |  | Satuan                                  | Indikator  | TW I   | TW II | TW III | TW IV | Total | TW I            | TW II       | TW III      | TW IV       | Total             | Koordinator                 | Pelaksana         |                   |
| <b>Sasaran Strategis I : Terciptanya tata kelola pemerintah digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel</b> |   |   |                   |  |   |  |  |       |        |       |       |                 |             |             |             |                   |                             |                   |                   |
| 1   | Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi / Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile | Persentase Penyederhanaan Birokrasi/Struktur Organisasi Perangkat Daerah  | 100               | Melaksanakan Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah dan Penyetaraan Jabatan | Perangkat Daerah                        | Jumlah Perangkat Daerah yang selesai dilaksanakan penyederhanaan birokrasi | 21   |       |        |       | 21    | 50.000.000      |             |             |             | 50.000.000        | Bagian Organisasi           | Bagian Organisasi |                   |
|   |   |   |                   |  | Jabatan                                 | Jumlah Jabatan yang selesai dilakukan Penyetaraan Jabatan Fungsional       | 244  |       |        |       | 244   | 50.000.000      |             |             |             | 50.000.000        | Bagian Organisasi           | Bagian Organisasi |                   |
| 2   | Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Modal Fleksibel bagi Pegawai ASN   | Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai  | 50                | Percepatan Implementasi Mekanisme Kerja  | Dokumen                                 | Jumlah Dokumen Pedoman Mekanisme Kerja yang Disusun                        |  |       | 1      | 1     |       |                 | 15.000.000  |             | 15.000.000  | Bagian Organisasi | Bagian Organisasi           |                   |                   |
| 3   | Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional  | Indeks SPBE   | 2,44              | Menyusun dokumen arsitektur SPBE   | Dokumen                                 | Jumlah dokumen arsitektur SPBE yang tersusun                               |  |       |        | 1     | 1     |                 |             | 29.995.598  | 29.995.598  | Diskominfo        | Diskominfo                  |                   |                   |
| 4   | Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi                                    | Nilai SAKIP   | 70 ( BB)          | Penguatan Implementasi SAKIP   | Persentase                              | Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen SAKIP Minimal Baik     |  | 75    |        |       | 75    |                 | 25.000.000  |             |             | 25.000.000        | Bagian Organisasi           | Bagian Organisasi |                   |
|   |   |   |                   |  | Persentase                              | Persentase Perangkat Daerah dengan penyampaian dokumen SAKIP tepat waktu   | 100  |       |        |       | 100   | 25.000.000      |             |             |             | 25.000.000        | Bagian Organisasi           | Bagian Organisasi |                   |
|   |   |   |                   |  | Peningkatan Kapasitas SDM               | Jumlah   | Jumlah Sosialisasi/ Bimtek yang dilaksanakan |       |        | 1     |       | 1               |             |             | 20.000.000  |                   | 20.000.000                  | Bagian Organisasi | Bagian Organisasi |
|   |   |   |                   |  | Percepatan perbaikan Implementasi SAKIP | Rekomendasi  | Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti      | 3     | 1      | 4     | 2     | 10              |             |             | 25.000.000  |                   | 25.000.000                  | Bagian Organisasi | Bagian Organisasi |
| 5   | Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja   | Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas                          | 70                | Pendampingan dan penilaian Zona Integritas terhadap 2 OPD                      | Nilai                                   | Rata-rata Capaian Nilai Zona Integritas                                    |  |       |        | 70    | 70    | 16.500.500      | 16.500.500  | 16.500.500  | 16.500.500  | 66.002.000        | Inspektorat                 | Inspektorat       |                   |
| 6   | Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)   | Tingkat Maturisasi SPIP   | 3                 | Pendampingan Pengisian SPIP  | Kegiatan                                | Jumlah Bimtek Pemetaan Resiko yang dilaksanakan                            |  |       |        | 1     | 1     | 24.999.879      | 24.999.879  | 24.999.879  | 24.999.882  | 99.999.519        | Inspektorat                 | Inspektorat       |                   |
| 7   | Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat  | Tingkat Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan | 100               | Peningkatan penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui kanal SP4N-LAPOR    | Pengaduan                               | Jumlah pengaduan masyarakat yang berhasil ditindaklanjuti                  | 10   | 10    | 10     | 10    | 40    | 12.000.000      | 12.000.000  | 12.000.000  | 12.000.000  | 48.000.000        | Diskominfo                  | Diskominfo        |                   |
|   |   |   | 100               | Pengawasan dengan tujuan tertentu  | Persentase                              | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti                                  | 25   | 25    | 25     | 25    | 100   | 225.000.000     | 225.000.000 | 225.000.000 | 225.000.000 | 900.000.000       | Inspektorat                 | Inspektorat       |                   |

| No | Kegiatan Utama   | Indikator KU  | Target Tahun 2023 | Rencana Aksi   | Output         |   | Target |       |        |       |             | Jumlah Anggaran |             |             |               |                                  | Unit/Satuan Kerja Pelaksana             |   |
|----|--|---|-------------------|--|----------------|---|--------|-------|--------|-------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------|---|---|
|    |  |   |                   |  | Satuan         | Indikator   | TW I   | TW II | TW III | TW IV | Total       | TW I            | TW II       | TW III      | TW IV         | Total                            | Koordinator                             | Pelaksana                               |
| 8  | Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi/Survei Penilaian Integritas | Survei Penilaian Integritas                           | 94                | Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas  | Persentase     | Capaian SPI   |        | 25    | 30     | 39    | 94          | 62.495.993      | 62.495.993  | 62.495.993  | 62.495.993    | 249.983.972                      | Inspektorat                             | Inspektorat                             |
|    |  |   |                   |  | Jumlah         | Laporan Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas                       |        |       |        | 1     | 1           |                 |             |             |               |                                  | 0                                       | Inspektorat                             |
| 9  | Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan           | Indeks Reformasi Hukum                                | 60                |  | Dokumen        | Jumlah Dokumen Propempera Tahun berjalan dan Tahun berikutnya birokrasi | 3      | 3     | 3      | 3     | 12          | 20.000.000      | 20.000.000  | 20.000.000  | 13.666.529    | 73.666.529                       | Bagian Hukum                            | Bagian Hukum                            |
|    |  |   |                   |  | Dokumen        | Jumlah Dokumen Propemperkada Tahun berjalan dan Tahun berikutnya        | 15     | 15    | 15     | 15    | 60          | 17.500.000      | 17.500.000  | 17.500.000  | 17.500.000    | 70.000.000                       | Bagian Hukum                            | Bagian Hukum                            |
| 10 | Pelaksanaan Arsip Digital                                      | Tingkat Digitalisasi Arsip                            | 60                | Alih media arsip dan penyimpanan arsip   | Persentase     | Persentase pelaksanaan arsip digital                                    | 15     | 15    | 15     | 15    | 60          | 30.000.000      | 40.000.000  | 20.000.000  | 26.386.567    | 116.386.567                      | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
|    |  |   |                   | Peningkatan Tata Kelola Kearsipan  | Dokumen        | Jumlah Dokumen Tatakelola Kearsipan yang disusun                        |        |       |        | 1     | 1           | 20.000.000      | 20.000.000  | 20.000.000  | 11.017.187    | 71.017.187                       | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan        |
| 11 | Pelaksanaan Data Statistik Sektoral                            | Tingkat Kematangan penyelenggaraan statistik sektoral | 100               | Menyusun dokumen rencana aksi satu data  | Dokumen        | Jumlah dokumen rencana aksi satu data yang tersusun                     |        |       | 1      |       | 1           |                 |             | 300.000.000 |               | 300.000.000                      | Diskominfo                              | Diskominfo                              |
|    |  |   |                   | Menyusun dokumen proses bisnis satu data   | Dokumen        | Jumlah dokumen proses bisnis satu data yang tersusun                    |        |       |        | 1     | 1           |                 |             |             | 152.588.235   | 152.588.235                      | Diskominfo                              | Diskominfo                              |
| 12 | Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah                 | Indeks Tata Kelola Pengadaan                          | 60                | Pemanfaatan Sistem Pengadaan   | Nilai (Max 30) | Nilai Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                | 19     |       | 19,96  |       | 38,96       | 62.950.969      | 62.950.969  | 62.950.969  | 62.950.969    | 251.803.876                      | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        |
|    |  |   |                   | Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ   | Nilai (Max 30) | Jumlah JF PPBJ Kabupaten Sambas   | 10,4   | 1,34  |        | 11,74 | 26.492.820  | 26.492.820      | 26.492.820  | 26.492.820  | 105.971.280   | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        |   |
|    |  |   |                   | Penguatan Tingkat Kematangan UKPBJ   | Nilai (Max 40) | Nilai Pencapaian Level Kematangan                                       | 8,89   | 17,78 | 8,89   | 35,56 | 284.306.138 | 284.306.138     | 284.306.138 | 284.306.138 | 1.137.224.552 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa        |   |
| 13 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset                        | Opini BPK   | WTP               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Tepat Waktu  | Dokumen        | Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran                                     | 44     |       |        |       | 44          |                 |             |             | 18.000.075    | 18.000.075                       | Badan Keuangan Daerah                   | Badan Keuangan Daerah                   |
|    |  |   |                   | Rekonsiliasi Keuangan dan Aset tepat waktu   | Dokumen        | Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Per Triwulan                           | 1      | 1     | 1      | 1     | 4           | 4.012.493       | 4.012.493   | 4.012.493   | 4.012.493     | 16.049.972                       | Badan Keuangan Daerah                   | Badan Keuangan Daerah                   |
|    |  |   |                   | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tepat Waktu   | Laporan        | Jumlah Laporan Keuangan Semester I                                      |        |       | 1      |       | 1           |                 |             | 9.999.910   |               | 9.999.910                        | Badan Keuangan Daerah                   | Badan Keuangan Daerah                   |
|    |  |   |                   | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu                                    | Laporan        | Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                               | 1      |       |        |       | 1           | 111.357.146     |             |             |               | 111.357.146                      | Badan Keuangan Daerah                   | Badan Keuangan Daerah                   |
|    |  |   |                   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD tepat waktu, dan sesuai ketentuan                       | Dokumen        | Jumlah Laporan RKBMD yang disusun tepat waktu                           |        | 1     |        |       | 1           |                 | 147.170.326 |             |               | 147.170.326                      | Badan Keuangan Daerah                   | Badan Keuangan Daerah                   |
|    |  |   |                   | Penyusunan Laporan BMD sesuai SAP dan Peraturan Pengelolaan BMD                              | Dokumen        | Jumlah Laporan BMD yang diselesaikan tepat waktu                        |        | 1     |        | 1     | 2           |                 | 75.503.000  |             | 113.255.802   | 188.758.802                      | Badan Keuangan Daerah                   | Badan Keuangan Daerah                   |
|    |  |   |                   | Pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan yang berlaku | Persentase     | Persentase Penyelesaian Dokumen BMD yang diusulkan                      | 25     | 25    | 25     | 25    | 100         | 48.854.120      | 48.854.120  | 48.854.120  | 48.854.120    | 195.416.480                      | Badan Keuangan Daerah                   | Badan Keuangan Daerah                   |
|    |  |   |                   | Pelaksanaan Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah                                    | Persentase     | Persentase Penerbitan sertifikat  | 10     | 30    | 40     | 20    | 100         | 33.733.623      | 101.200.869 | 134.934.492 | 67.467.246    | 337.336.230                      | Badan Keuangan Daerah                   | Badan Keuangan Daerah                   |

| No   | Kegiatan Utama  | Indikator KU                               | Target Tahun 2023 | Rencana Aksi   | Output           |  | Target |       |        |       |       | Jumlah Anggaran |            |            |            |  | Unit/Satuan Kerja Pelaksana                            |  |                   |
|--|---|--|-------------------|--|------------------|--|--------|-------|--------|-------|-------|-----------------|------------|------------|------------|--|--|--|-------------------|
|  |   |  |                   |  | Satuan           | Indikator  | TW I   | TW II | TW III | TW IV | Total | TW I            | TW II      | TW III     | TW IV      | Total  | Koordinator  | Pelaksana  |                   |
| <b>Sasaran Strategis 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK ASN yang Profesional</b> |   |  |                   |  |                  |  |        |       |        |       |       |                 |            |            |            |  |  |  |                   |
| 1  | 1. Penataan Jabatan Fungsional, 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN, 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, 4. Penguatan Sistem Merit | Indeks Sistem Merit                        | 285               | Pelantikan pejabat fungsional  | Jumlah           | Jumlah pejabat fungsional yang dilantik                      |        |       | 175    | 413   | 588   |                 |            |            |            | 0  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah |                   |
|  |   |  |                   | Pelaksanaan assessment bagi jabatan pelaksana  | Jumlah           | Jumlah pejabat yang diassessment                             |        | 85    | 241    | 326   |       | 7.650.000       | 21.690.000 |            | 29.340.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah |  |                   |
|  |   |  |                   | Pelaksanaan pemutakhiran data informasi kepegawaian ASN ke basis teknologi informasi | Jumlah           | Jumlah dokumen pemutakhiran data ASN yang tersusun           | 250    | 250   | 250    | 250   | 1000  |                 |            |            |            | 0  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah |                   |
|  |   |  |                   | Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN  | Indeks           | Indeks pengukuran IIP ASN yang tersusun                      |        | 56    |        |       | 56    |                 |            |            |            | 0  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah |                   |
| 2  | Pelaksanaan Core Values ASN   | Indeks BerAKHLAK                           | 70 (B)            | Sosialisasi Survei Budaya Kerja ASN  | Jumlah           | Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Survei Budaya Kerja ASN       |        |       | 1      |       | 1     |                 |            | 12.000.000 |            | 12.000.000   | Bagian Organisasi                                      | Bagian Organisasi                                      |                   |
|  |   |  |                   | Pengisian Survei Budaya Kerja ASN  | Persentase       | Persentase Pegawai yang mengisi Survei Budaya Kerja ASN      |        |       | 40     |       | 40    |                 |            | 12.000.000 |            | 12.000.000   | Bagian Organisasi                                      | Bagian Organisasi                                      |                   |
|  |   |  |                   | Penguatan Implementasi Budaya Kerja  | Persentase       | Persentase PD yang telah internalisasi budaya kerja          |        |       |        | 50    | 50    |                 |            | 30.000.000 |            | 30.000.000   | Bagian Organisasi                                      | Bagian Organisasi                                      |                   |
| 6  | Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima  | Indeks Pelayanan Publik                    | 3,7               | Pendampingan Unit Lokus Evaluasi   | Perangkat daerah | Jumlah PD yang dilakukan pembinaan                           |        |       | 3      |       | 3     |                 |            | 35.000.000 |            | 35.000.000   | Bagian Organisasi                                      | Bagian Organisasi                                      |                   |
|  |   | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | 80                | Pendampingan Unit Lokus Penilaian  | Jumlah           | Jumlah PD yang dilakukan pembinaan                           |        |       | 7      |       | 7     |                 |            | 50.000.000 |            | 50.000.000   | Bagian Organisasi                                      | Bagian Organisasi                                      |                   |
|  |   |  |                   | Peningkatan Kolaborasi Pengawasan dan penilaian pelayanan Publik                     | Dokumen          | Jumlah MOU Kerjasama dengan Ombudsman                        |        |       | 1      |       | 1     |                 |            |            | 35.000.000 |  | 35.000.000   | Bagian Organisasi                                      | Bagian Organisasi |
|  |   | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)           | 85                | Percepatan Penyusunan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat                               | Perangkat daerah | Jumlah PD dan UPTD yang menyampaikan Laporan SKM Tepat Waktu |        | 50    |        | 50    |       | 100             |            | 20.000.000 |            | 15.000.000   | 35.000.000   | Bagian Organisasi                                      | Bagian Organisasi |
|  |   |  |                   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi  | Persentase       | Persentase PD yang menindaklanjuti hasil SKM                 |        |       |        | 75    |       | 75              |            |            |            | 60.000.000   |  | 60.000.000   | Bagian Organisasi |



BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 19 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023

| No | Tema                   | Permasalahan   | Sasaran  | Indikator  | Target   | Rencana Aksi   | Output  |  | Target                |   |                           |                           |                               | Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama) | Jumlah Anggaran |               |               |               |                | Unit/Satuan Kerja Pelaksana |                   |
|----|------------------------|--|--|--|--|--|---------|--|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
|    |                        |  |  |  |  |  | Setuan  | Indikator  | TW I                  | TW II   | TW III                    | TW IV                     | Total                         |   | TW I            | TW II         | TW III        | TW IV         | Total          | Koordinator                 | Pelaksana         |
| 1  | Pengentasan Kemiskinan | Masih banyaknya masyarakat kurang mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan di Kabupaten Sambas   | Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat                        | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Jaminan Kesehatan  | 110.000  | Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPJ-BP) yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Sambas   | Orang   | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Jaminan Kesehatan  | 27.500                | 27.500  | 27.500                    | 27.500                    | 110.000                       | Terkait   | 3.068.025.450   | 3.068.025.450 | 3.068.025.450 | 3.068.025.450 | 12.272.101.800 | Dinas Kesehatan             | Dinas Kesehatan   |
|    |                        | Minimnya pengetahuan ibu tentang Jampersal, gejala dan tanda persalinan serta persalinan yang aman dan masih ditemukannya status gizi balita dibawah garis                 | Meningkatnya tingkat kesehatan ibu dan anak                      | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan   | 1.000  | Memfasilitasi Operasional Rumah Tunggu Kelahiran, makan dan minum pasien di rumah tunggu kelahiran, dan Transport Rujukan  | Orang   | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan   | 0                     | 150   | 150                       | 200                       | 500                           | Terkait   | 0               | 200.000.000   | 250.000.000   | 250.000.000   | 700.000.000    | Dinas Kesehatan             | Dinas Kesehatan   |
|    |                        |  | Meningkatnya Kesehatan bayi                                      | Jumlah ibu hamil KEK dan balita kurang gizi yang mendapatkan pelayanan kesehatan                           | 1.025 (Bumil)<br>2.206 (Balita)  | Pemberian PMT dalam bentuk makanan jadi berbasis pangan lokal, diberikan kepada balita kurang gizi dan Ibu hamil Kekurangan Energi Korenik (KEK) 1 kali makan selama 90 hr makan melalui Tenaga Pengelola PMT yang ditunjuk (kader posyandu atau PKK desa atau tenaga lainnya) | Orang   | Jumlah ibu hamil KEK dan balita kurang gizi yang mendapatkan pelayanan kesehatan                           | 0 Bumil<br>0 (Balita) | 300 Bumil<br>600 (Balita)   | 300 Bumil<br>800 (Balita) | 425 Bumil<br>806 (Balita) | 1.025 Bumil<br>2.206 (Balita) | Terkait   | 0               | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.298.203.955 | 5.298.203.955  | Dinas Kesehatan             | Dinas Kesehatan   |
|    |                        | Masih banyaknya Lanjut Usia Telantar ( seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih) yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya | terjaminnya kualitas hidup lanjut usia terlanjar dan disabilitas | Jumlah Lansia Terlanjar yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal | 100  | Pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal  | Orang   | Jumlah Lansia Terlanjar yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal | 25                    | 25  | 25                        | 25                        | 100                           | Terkait   | 11.249.927      | 11.249.927    | 11.249.927    | 11.249.927    | 44.999.708     | Dinas Sosial, PMD           | Dinas Sosial, PMD |
|    |                        |  |  | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu  | 23   | Penyediaan alat bantu dan alat bantu peraga  | Orang   | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu  | 0                     | 0   | 0                         | 23                        | 23                            | Terkait   |                 |               |               | 29.700.000    | 29.700.000     | Dinas Sosial, PMD           | Dinas Sosial, PMD |
|    |                        |  |  | Jumlah penyandang disabilitas mental yang mendapatkan layanan kesehatan                                    | 10   | Pemberian akses layanan kesehatan  | Orang   | Jumlah penyandang disabilitas mental yang mendapatkan layanan kesehatan                                    | 10                    | 10  | 10                        | 10                        | 40                            | Terkait   | 12.500.000      | 12.500.000    | 12.500.000    | 12.500.000    | 50.000.000     | Dinas Sosial, PMD           | Dinas Sosial, PMD |
|    |                        |  |  | Masih banyak penduduk miskin yang belum tercakup dalam sistem jaminan kesehatan                            | Tersalurkannya bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang tepat sasaran | Jumlah penduduk miskin yang dilakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan iuran  | 203.405 | Verifikasi dan validasi kelayakan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional                   | Orang                 | Jumlah penduduk miskin yang dilakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan iuran | 0                         | 0                         | 0                             | 203.405   | 203.405         | Terkait       |               |               |                | 306.293.157                 | 306.293.157       |

| No | Tema | Permasalahan  | Sasaran  | Indikator   | Target  | Rencana Aksi   | Output       |   | Target  |         |         |         |         | Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama) | Jumlah Anggaran |             |               |               |                                     | Unit/Satuan Kerja Pelaksana         |                   |
|----|------|---|--|---|---------|--|--------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---|-----------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|    |      |   |  |   |         |  | Satuan       | Indikator   | TW I    | TW II   | TW III  | TW IV   | Total   |   | TW I            | TW II       | TW III        | TW IV         | Total                               | Koordinator                         | Pelaksana         |
|    |      |   |  |   |         |  |              |   |         |         |         |         |         |   |                 |             |               |               |                                     |                                     |                   |
|    |      | Data penduduk miskin masih belum akurat   | Penduduk miskin dan orang tidak mampu  | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata   | 232.831 | Verifikasi dan validasi kelayakan usulan data penduduk miskin  | Orang        | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata   | 232.831 | 232.831 | 232.831 | 232.831 | 931.324 | Terkait   | 39.999.982      | 39.999.982  | 39.999.982    | 39.999.982    | 159.999.928                         | Dinas Sosial, PMD                   | Dinas Sosial, PMD |
|    |      | Masih terdapat indikasi program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran   | Penduduk miskin dan orang tidak mampu  | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin   | 56.013  | Pengelolaan data fakir miskin  | Keluarga     | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota  | 56.013  | 56.013  | 56.013  | 56.013  | 224.052 | Terkait   | 3.749.962       | 3.749.962   | 3.749.962     | 3.749.963     | 14.999.849                          | Dinas Sosial, PMD                   | Dinas Sosial, PMD |
|    |      |   |  | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | 3.639   | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | Keluarga     | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | 3.639   | 3.639   | 3.639   | 3.639   | 14.556  | Terkait   | 156.499.907     | 156.499.907 | 156.499.907   | 156.499.910   | 625.999.631                         | Dinas Sosial, PMD                   | Dinas Sosial, PMD |
|    |      | Minimnya keberdayaan penduduk miskin dalam menjalankan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga | Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat  | 10      | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat   | Orang        | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota   |         |         |         | 10      | 10      | Terkait   |                 |             |               | 9.999.931     | 9.999.931                           | Dinas Sosial, PMD                   | Dinas Sosial, PMD |
|    |      | Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap Air Minum Layak  | Terpenuninya akses air minum yang standar atau layak                                   | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan penambahan sambungan rumah melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | 1.257   | Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Air Minum Layak berupa Sambungan Rumah (SR) untuk tiap Rumah Tangga  | Rumah tangga | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan penambahan sambungan rumah melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu |         |         |         | 1.257   | 1.257   | Terkait   |                 |             |               | 9.920.620.216 | 9.920.620.216                       | Dinas Perkim-LH                     | Dinas Perkim-LH   |
|    |      | Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap Sanitasi Layak   | Meningkatnya sanitasi masyarakat berpenghasilan rendah                                 | Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik   | 827     | Penyaluran Dana DAK melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai pelaksana pembangunan  | Rumah tangga | Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik   | 0       | 0       | 237     | 590     | 827     | Terkait   |                 |             | 1.688.625.000 | 5.065.875.000 | 6.754.500.000                       | Dinas Perkim-LH                     | Dinas Perkim-LH   |
|    |      |   | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Persentase Rumah tidak layak huni yang berhasil dilakukan peningkatan kualitas Rumah/direnovasi   | 9       | Melakukan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat tidak mampu/prasejahtera dan masyarakat berpenghasilan | Rumah        | Jumlah rumah tidak layak huni yang dilakukan peningkatan kualitas Rumah/direnovasi  |         |         |         | 9       | 9       | Terkait   |                 |             |               | 201.568.960   | 201.568.960                         | Dinas Perkim-LH                     | Dinas Perkim-LH   |
|    |      | Masih rendahnya jumlah penduduk usia kerja yang memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja                    | Meningkatnya kapasitas tenaga kerja  | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi  | 32      | Meningkatkan kualitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi   | Orang        | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi  |         |         | 16      | 16      | 32      | Terkait   |                 |             | 241.436.908   | 241.436.908   | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |                   |

| No | Tema | Permasalahan   | Sasaran   | Indikator  | Target | Rencana Aksi   | Output |  | Target |       |        |       |       | Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama) | Jumlah Anggaran |             |             |             |             | Unit/Satuan Kerja Pelaksana         |                                     |
|----|------|--|---|--|--------|--|--------|--|--------|-------|--------|-------|-------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    |      |  |   |  |        |  | Satuan | Indikator  | TW I   | TW II | TW III | TW IV | Total |   | TW I            | TW II       | TW III      | TW IV       | Total       | Koordinator                         | Pelaksana                           |
|    |      | Belum memiliki ruang pelayanan yang memadai dan Petugas layanan belum memiliki kompetensi yang memadai membutuhkan program perluasan kesempatan kerja masih cukup banyak yang belum difasilitasi | Meningkatnya SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Persentase Angkatan Kerja yang Diperdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja   | 5      | Meningkatkan SDM Pelayanan antar Kerja Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi | Orang  | Jumlah Angkatan Kerja yang Mendapatkan Layanan Antar Kerja                       |        |       | 5      |       | 5     | Terkait   |                 |             | 23.288.760  |             | 23.288.760  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|    |      | Jumlah pemohon sebagai penerima manfaat yang membutuhkan program perluasan kesempatan kerja masih cukup banyak yang belum difasilitasi   | Terlaksananya Tenaga Kerja yang akan Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL   | Jumlah Tenaga Kerja yang Diperdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 25     | Penempatan Tenaga Kerja melalui Layanan AKAD dan AKL   | Orang  | Jumlah Tenaga Kerja yang Diperdayakan Melalui Layanan AKAD dan AKL               |        |       | 25     |       | 25    | Terkait   |                 |             | 10.147.664  |             | 10.147.664  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|    |      | Jumlah pemohon sebagai penerima manfaat yang membutuhkan program perluasan kesempatan kerja masih cukup banyak yang belum difasilitasi   | terlaksananya Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan   | Jumlah Tenaga Kerja yang Diperdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 25     | Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                                  | Orang  | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan                    |        |       |        | 25    | 25    | Terkait   |                 |             |             | 10.147.664  | 10.147.664  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|    |      | Jumlah pemohon sebagai penerima manfaat yang membutuhkan program perluasan kesempatan kerja masih cukup banyak yang belum difasilitasi   | Terlaksananya Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD   | Jumlah Tenaga Kerja yang Diperdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 5      | Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD                                  | Orang  | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD           |        |       |        | 5     | 5     | Terkait   |                 |             |             | 38.333.520  | 38.333.520  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|    |      | Belum memiliki ruang pelayanan yang memadai dan Petugas layanan belum memiliki kompetensi yang memadai membutuhkan program perluasan kesempatan kerja masih cukup banyak yang belum difasilitasi | Terlaksananya Tenaga Kerja yang Diperdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja                                     | Jumlah Tenaga Kerja yang Diperdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 20     | Tenaga Kerja yang Diperdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja                        | Orang  | Jumlah Tenaga Kerja yang Diperdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja | 20     |       |        |       |       | 20  | Terkait         |             |             | 288.759.344 | 288.759.344 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|    |      | Masih banyak Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan yang belum mendapatkan manfaat program pemberdayaan   | PMI (Pra dan Purna Penempatan)  | Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang diperdayakan                          | 20     | Peningkatan kompetensi dan layanan perlindungan bagi PMI (Pra dan Purna Penempatan)              | Orang  | Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang diperdayakan                          |        |       |        | 50    | 50    | Terkait   |                 |             | 122.259.344 |             | 122.259.344 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|    |      |  | CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani  | Persentase Angkatan Kerja yang Diperdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja   | 50     | CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani                 | Orang  | Jumlah PMI yang Mendapatkan Layanan Pelindungan Pra dan Purna Penempatan         |        |       | 50     |       | 50    | Terkait   |                 | 90.401.400  |             |             | 90.401.400  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|    |      |  | PMI Purna yang Diperdayakan   | Jumlah PMI yang Mendapatkan Layanan Pelindungan Pra dan Purna Penempatan         | 10     | PMI Purna yang Diperdayakan  | Orang  | Jumlah PMI yang Mendapatkan Layanan Pelindungan Pra dan Purna Penempatan         |        | 10    |        |       | 10    | Terkait   |                 | 288.759.344 |             |             | 288.759.344 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| No | Tema | Permasalahan   | Sasaran  | Indikator  | Target | Rencana Aksi  | Output            |  | Target |       |        |       |       | Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama) | Jumlah Anggaran |            |             |               |            | Unit/Satuan Kerja Pelaksana |                                     |                                     |
|----|------|--|--|--|--------|---|-------------------|--|--------|-------|--------|-------|-------|---|-----------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    |      |  |  |  |        |   | Satuan            | Indikator  | TW I   | TW II | TW III | TW IV | Total |   | TW I            | TW II      | TW III      | TW IV         | Total      | Koordinator                 | Pelaksana                           |                                     |
|    |      |  |  |  |        |   |                   |  |        |       |        |       |       |   |                 |            |             |               |            |                             |                                     |                                     |
|    |      |  | Tercapainya Tenaga Kerja yang mendapat jaminan sosial                  | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 400    | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   | Orang             | Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | 400    |       |        |       |       | 400   | Terkait         | 60.949.147 |             |               |            | 60.949.147                  | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|    |      |  | Meningkatnya Infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan pada satuan | Kelompok usaha transmigrasi yang diberi pelatihan usaha ekonomi produktif                            | 2      | Pemberdayaan warga transmigrasi melalui pelatihan usaha ekonomi produktif   | Satuan Permukiman | Kelompok usaha transmigrasi yang diberi pelatihan usaha ekonomi produktif                            |        | 2     |        |       |       | 2   | Terkait         |            | 139.999.574 |               |            | 139.999.574                 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|    |      | Komoditi yang dibudidayakan/dikembangkan belum familiar di masyarakat/ rumah tangga  | Meningkatnya kemampuan kelompok Tani                                   | Jumlah Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan pendampingan teknis dalam pemanfaatan pekarangan rumah  | 10     | Pelatihan dan Pembinaan pada Kelompok Wanita Tani di Pekarangan Rumah   | KWT               | Jumlah Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan pendampingan teknis dalam pemanfaatan pekarangan rumah  |        | 5     | 5      |       |       | 10  | Terkait         |            |             | 1.355.000.000 |            | 1.355.000.000               | Dinas Pertanian dan KP              | Dinas Pertanian dan KP              |
|    |      |  | Ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten                                 | Jumlah Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten   | 18.500 | Ketersediaan cadangan pangan pemerintah dalam penanganan bencana alam   | Kg                | Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten yang tersedia   | 18.500 |       |        |       |       | 18.500  | Terkait         |            |             |               | 15.861.000 | 15.861.000                  | Dinas Pertanian dan KP              | Dinas Pertanian dan KP              |
|    |      | Pemanfaatan lahan pekarangan dan demplot sudah dilaksanakan namun pemanfaatan hasil sayur dan buah untuk konsumsi rumah tangga belum menjadi pola hidup yang rutin dilaksanakan di dalam rumah | Terlaksananya Pekarangan Pangan Lestari                                | Jumlah KWT yang memanfaatkan Pekarangan Pangan Lestari   | 5      | Peningkatan keterampilan dan pengelolaan pekarangan rumah tangga  | KWT               | Jumlah Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten   |        | 2     | 3      |       |       | 5   | Terkait         |            | 120.000.000 | 180.000.000   |            | 300.000.000                 | Dinas Pertanian dan KP              | Dinas Pertanian dan KP              |
|    |      | Masih banyaknya penyaluran bantuan pemerintah yang masih belum tepat sasaran   | Tersalurkannya bantuan bagi sesuai sasaran                             | Jumlah peternak yang mendapatkan bantuan   | 2      | Memberikan bantuan berupa kandang kambing kepada peternak di Kabupaten Sambas   | Kelompok tani     | Jumlah peternak yang mendapatkan bantuan   |        |       | 2      |       |       | 2   | Terkait         |            |             | 45.000.000    |            | 45.000.000                  | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH  | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH  |
|    |      |  |  | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan  | 3      | Memberikan bantuan ternak (sapi, kambing, ayam dan itik) kepada peternak di Kabupaten Sambas  | Kelompok tani     | Jumlah peternak yang mendapatkan bantuan   |        |       | 3      |       |       | 3   | Terkait         |            |             | 179.000.000   |            | 179.000.000                 | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH  | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH  |
|    |      |  |  | Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan                         | 529    | Memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap (alat tangkap ikan, kapal motor, perahu dan mesin) kepada masyarakat nelayan kecil di Kabupaten Sambas | orang             | Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan                         |        |       | 529    |       |       | 529   | Terkait         |            |             | 3.196.000.000 |            | 3.196.000.000               | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH  | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH  |
|    |      |  |  | Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan asuransi   | 223    | Memberikan bantuan berupa asuransi kepada masyarakat nelayan kecil di Kabupaten Sambas  | Orang             | Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan asuransi   |        |       | 223    |       |       | 223   | Terkait         |            |             | 44.956.800    |            | 44.956.800                  | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH  | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH  |
|    |      |  |  | Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan Paket Germarikan  | 1.370  | Memberikan bantuan berupa Paket Germarikan (Gemar Makan Ikan) dalam rangka pencegahan stunting kepada masyarakat di Kabupaten Sambas                                    | Orang             | Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan Paket Germarikan  |        |       | 1.370  |       |       | 1.370   | Terkait         |            |             | 198.650.000   |            | 198.650.000                 | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH  | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH  |

| No | Tema   | Permasalahan | Sasaran                                   | Indikator   | Target | Rencana Aksi   | Output     |  | Target |       |        |       |       | Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama) | Jumlah Anggaran |             |             |             |  | Unit/Satuan Kerja Pelaksana                        |                                    |
|----|--|--------------|---|---|--------|--|------------|--|--------|-------|--------|-------|-------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|------------------------------------|
|    |  |              |   |   |        |  | Satuan     | Indikator  | TW I   | TW II | TW III | TW IV | Total |   | TW I            | TW II       | TW III      | TW IV       | Total  | Koordinator  | Pelaksana                          |
|    |  |              |   | Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan berupa prasarana pemasaran ikan                                   | 97     | Memberikan bantuan berupa prasarana pemasaran ikan kepada masyarakat nelayan kecil di Kabupaten Sambas   | Orang      | Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan bantuan berupa prasarana pemasaran ikan  |        |       |        | 97    | 97    | Terkait   |                 |             |             | 145.000.000 | 145.000.000  | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH                 | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH |
|    |  |              |   | Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana pengolahan ikan   | 89     | Memberikan bantuan berupa sarana pengolahan ikan kepada masyarakat pengolahan ikan di Kabupaten Sambas   | Orang      | Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana pengolahan ikan  |        |       |        | 89    | 89    | Terkait   |                 |             |             | 145.000.000 | 145.000.000  | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH                 | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH |
|    |  |              |   | Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan                                   | 19     | Memberikan Bantuan bagi pembudidaya ikan berupa sarana dan prasarana budidaya ikan dalam rangka memenuhi kebutuhan protein keluarga dan meningkatkan perekonomian keluarga | kelompok   | Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan  |        | 11    | 8      |       | 19    | Terkait   |                 | 477.000.000 | 219.562.726 |             | 696.562.726  | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH                 | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH |
|    |  |              |   | Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan                                   | 4      | Memberikan bantuan berupa pembangunan kolam percontohan, pembangunan saluran tambak dan rehabilitasi tambak tradisional kepada pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Sambas  | kelompok   | Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan  |        |       | 4      |       | 4     | Terkait   |                 | 672.000.000 |             |             | 672.000.000  | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH                 | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH |
|    |  |              |   | Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan                                   | 19     | Memberikan bantuan berupa sarana kolam terpal dalam rangka pencegahan stunting kepada pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Sambas   | kelompok   | Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan  |        | 10    | 9      |       | 19    | Terkait   |                 | 207.205.263 | 186.484.737 |             | 393.690.000  | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH                 | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH |
|    |  |              | Meningkatnya kualitas keluarga            | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                           | 1.044  | Memberikan Bantuan bagi masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk melakukan pemasangan atau Pencabutan KB MKJP  | Akseptor   | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                    | 261    | 261   | 261    | 261   | 1.044 | Terkait   |                 | 121.484.000 | 121.484.000 | 255.439.000 | 498.407.000  | DP3AP2KB   | DP3AP2KB                           |
|    | Kemampuan manajerial pengelola koperasi masih rendah |              | Meningkatnya perkembangan koperasi sehat. | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, serta Akuntabilitas Koperasi. | 14     | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota  | unit usaha | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi. | 3      | 4     | 4      | 3     | 14    | Terkait   |                 | 66.366.680  |             | 66.366.680  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |                                    |
|    |  |              |   | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan.   | 10     | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota   | unit usaha | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan.  | 2      | 3     | 3      | 2     | 10    | Terkait   |                 | 34.330.080  |             | 34.330.080  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |                                    |
|    |  |              |   | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian  | 110    | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  | orang      | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian   | 30     | 30    | 30     | 20    | 110   | Terkait   |                 | 530.387.000 |             | 530.387.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |                                    |

| No | Tema | Permasalahan  | Sasaran   | Indikator   | Target                           | Rencana Aksi  | Output       |   | Target       |  |        |       |       | Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama) | Jumlah Anggaran |             |             |             |  | Unit/Satuan Kerja Pelaksana                        |  |  |
|----|------|---|---|---|----------------------------------|---|--------------|---|--------------|--|--------|-------|-------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
|    |      |   |   |   |                                  |   | Satuan       | Indikator   | TW I         | TW II  | TW III | TW IV | Total |   | TW I            | TW II       | TW III      | TW IV       | Total  | Koordinator  | Pelaksana  |  |
|    |      | Terbatasnya informasi jaringan pemasaran, akses permodalan dan masih lemahnya jaringan distribusi pemasaran produk. | Meningkatnya Jumlah Usaha yang produktif              | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi. | 60                               | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi. | unit usaha   | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi. | 15           | 15   | 15     | 15    | 60    | Terkait   |                 |             | 449.798.000 |             | 449.798.000  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |  |
|    |      | Kemampuan manajerial pengelola usaha mikro yang masih rendah  | Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan | Jumlah data potensi dan pengembangan usaha mikro  | 1                                | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  | Dokumen      |   |              |  |        | 1     | 1     | Tidak terkait   |                 |             | 280.000.000 |             | 280.000.000  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |  |
|    |      |   |   | Jumlah Unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro   | 223                              | Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro   | unit usaha   |   |              |  |        |       | 223   | 223   | Terkait         |             |             | 673.671.800 |  | 673.671.800  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |   |   | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro   | 50                               | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro   | orang        | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi.  |              | 10   | 10     | 15    | 15    | 50  | Tidak terkait   |             |             | 263.780.000 |  | 263.780.000  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |   |   | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi   | 30                               | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi   | Unit usaha   | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi   |              |  |        | 30    |       | 30  | Terkait         |             |             | 305.000.000 |  | 305.000.000  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |   |   | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan  | 70                               | Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha Mikro  | orang        | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan  |              |  |        | 35    | 35    | 70  | Terkait         |             |             | 210.185.000 |  | 210.185.000  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |   |   | Masih rendahnya pengetahuan pengusaha/pedagang tentang mekanisme dan peraturan perundang-undangan terkait ekspor.   | Meningkatkan Pengembangan Ekspor | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina  | 40           | Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota  | Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina | 10     | 10    | 10    | 10  | 40              | Terkait     |             |             | 60.007.312   |  | 60.007.312   | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      | Terbatasnya ketersediaan informasi komoditi perdagangan yang berpotensi untuk diekspor.                             | Meningkatnya pertumbuhan industri                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan  | 10                               | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan   | Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan  |              |  |        | 10    | 10    | Terkait   |                 | 162.368.687 |             | 162.368.687 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |  |  |

| No | Tema | Permasalahan  | Sasaran   | Indikator  | Target | Rencana Aksi   | Output         |  | Target  |        |        |        |         | Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama) | Jumlah Anggaran |                |                |                |                 | Unit/Satuan Kerja Pelaksana                        |  |
|----|------|---|---|--|--------|--|----------------|--|---------|--------|--------|--------|---------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|
|    |      |   |   |  |        |  | Satuan         | Indikator  | TW I    | TW II  | TW III | TW IV  | Total   |   | TW I            | TW II          | TW III         | TW IV          | Total           | Koordinator  | Pelaksana  |
|    |      |   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri   | 1      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                    | Dokumen        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri   |         |        |        | 1      | 1       | Tidak terkait   |                 |                |                | 128.963.036    | 128.963.036     | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  | 1      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri   | Dokumen        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  |         |        |        | 1      | 1       | Tidak terkait   |                 |                |                | 586.821.000    | 586.821.000     | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  | 1      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   | Dokumen        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  |         |        |        | 1      | 1       | Tidak terkait   |                 |                |                | 709.240.724    | 709.240.724     | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |   |   | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri   | 1      | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri   | Dokumen        | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri   |         |        |        | 1      | 1       | Tidak terkait   |                 |                |                | 90.000.000     | 90.000.000      | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota | 1      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota |         |        |        | 1      | 1       | Tidak terkait   |                 |                |                | 25.000.000     | 25.000.000      | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas   | 1      | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINas               | Dokumen        | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas   |         |        |        | 1      | 1       | Tidak terkait   |                 |                |                | 20.000.000     | 20.000.000      | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      | Faktor Luasnya wilayah Kabupaten Sambas sehingga masih perlu adanya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan | Meningkatnya Ketersediaan dan Kelayakan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan   | 50.000 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Pembebasan Lahan  | M <sup>2</sup> | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan   | 130.000 | 12.000 | 13.000 | 12.000 | 167.000 | Terkait   |                 |                | 175.000.000    | 175.000.000    | Dinas PU dan PR | Dinas PU dan PR                                    |  |
|    |      |   |   |  | 35,18  | Pembangunan Jalan  | Km             | Panjang Jalan yang dibangun  | 7,50    | 8,80   | 9,44   | 9,44   | 35,18   | Terkait   | 16.882.779.684  | 16.716.954.684 | 29.169.517.843 | 22.610.662.891 | 85.379.915.102  | Dinas PU dan Penataan Ruang                        | Dinas PU dan Penataan Ruang                        |
|    |      |   |   |  | 13,33  | Rehabilitasi Jalan   | Km             | Panjang Jalan yang direhabilitasi  | 2,33    | 2,94   | 3,50   | 4,56   | 13,33   | Terkait   | 358.429.390     | 369.429.390    | 20.700.868.531 | 15.539.838.599 | 36.968.565.910  | Dinas PU dan Penataan Ruang                        | Dinas PU dan Penataan Ruang                        |

| No | Tema  | Permasalahan   | Sasaran   | Indikator  | Target | Rencana Aksi  | Output     |  | Target |       |        |       |       | Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama) | Jumlah Anggaran |               |               |               |                                | Unit/Satuan Kerja Pelaksana                  |   |
|----|---|--|---|--|--------|---|------------|--|--------|-------|--------|-------|-------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--|---|
|    |   |  |   |  |        |   | Satuan     | Indikator  | TW I   | TW II | TW III | TW IV | Total |   | TW I            | TW II         | TW III        | TW IV         | Total                          | Koordinator                                  | Pelaksana                                     |
|    |   |  |   |  | 2      | Pemeliharaan Berkala Jalan  | Km         | Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala   | 0,50   | 0,50  | 0,50   | 0,50  | 2     | Terkait   | 887.499.906     | 604.166.573   | 947.499.906   | 380.833.274   | 2.819.999.659                  | Dinas PU dan Penataan Ruang                  | Dinas PU dan Penataan Ruang                   |
|    |   |  |   |  | 3      | Pemeliharaan Rutin Jalan  | Km         | Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin   | 0,75   | 0,75  | 0,75   | 0,75  | 3     | Terkait   | 305.685.654     | 255.085.884   | 485.077.666   | 15.900.000    | 1.061.749.204                  | Dinas PU dan Penataan Ruang                  | Dinas PU dan Penataan Ruang                   |
|    |   |  |   |  | 335    | Pembangunan Jembatan  | M          | Panjang Jembatan yang dibangun   | 30     | 70    | 85     | 150   | 335   | Terkait   | 2.476.349.484   | 2.676.349.484 | 4.165.769.584 | 2.722.644.281 | 12.041.112.833                 | Dinas PU dan Penataan Ruang                  | Dinas PU dan Penataan Ruang                   |
|    |   |  |   |  | 64     | Rehabilitasi Jembatan   | M          | Panjang Jembatan yang direhabilitasi   | 5      | 15    | 20     | 24    | 64    | Terkait   | 103.749.908     | 143.749.908   | 167.749.908   | 127.073.935   | 542.323.659                    | Dinas PU dan Penataan Ruang                  | Dinas PU dan Penataan Ruang                   |
| 2  | Peningkatan Investasi                                       | Minat investasi di daerah masih belum optimal  | Meningkatkan jumlah investor yang berinvestasi di daerah  | Persentase Peningkatan Jumlah Investor   | 8      | Mengikuti event promosi investasi tingkat Nasional dan Propinsi   | Investor   | Jumlah Investor yang berinvestasi di daerah  | 2      | 2     | 2      | 2     | 8     | Terkait   | 75.336.610,25   | 75.336.610,25 | 75.336.610,25 | 75.336.610,25 | 301.346.441                    | Dinas Penanaman Modal dan PTSP               | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                |
|    |   |  |   |  | 1      | Penyajian data / informasi potensi dan peluang investasi secara digital   | Peta       | Jumlah Peta Potensi Investasi digital  |        |       |        | 1     | 1     | Terkait   |                 |               | 68.086.212    | 68.086.212    | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Dinas Penanaman Modal dan PTSP               |   |
|    |   | Belum optimalnya peningkatan nilai realisasi investasi   | peningkatan peyerapan tenaga kerja dan peningkatan perkonomian daerah   | Persentase peningkatan nilai realisasi investasi                                     | 10     | Optimalisasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek terkait LKPM  | Persentase | Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi   | 2      | 2     | 3      | 3     | 10    | Terkait   | 120.667.430     | 120.667.430   | 120.667.430   | 120.667.430   | 482.669.718                    | Dinas Penanaman Modal dan PTSP               | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                |
|    |   | Masuknya proses perizinan harus sesuai dengan dokumen Perencanaan Tata Ruang Daerah yang mana dokumen tersebut belum semuanya tersusun sehingga terkendalanya proses perizinan yang sesuai dengan dokumen perencanaan. | Tersusnya dokumen perencanaan Tata Ruang  | Meningkatnya Kualitas Proses Perizinan yang sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang | 4      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota  | Dokumen    | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota  | 1      | 1     | 1      | 1     | 4     | Terkait   | 16.306.100      | 29.973.900    | 16.329.450    | 12.390.850    | 75.000.300                     | Dinas PU dan Penataan Ruang                  | Dinas PU dan Penataan Ruang                   |
|    |   |  |   |  | 4      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota  | Dokumen    | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota   | 1      | 1     | 1      | 1     | 4     | Terkait   | 26.029.350      | 31.774.900    | 18.532.700    | 34.149.955    | 110.486.905                    | Dinas PU dan Penataan Ruang                  | Dinas PU dan Penataan Ruang                   |
| 3  | Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penurunan Stunting) | Belum tersedianya sistem yang mampu memuat pelaporan data balita secara real time dan berdasarkan BNEA untuk menjadi acuan intervensi dalam pencegahan dan penurunan stunting Kab. Sambas                              | Aplikasi SIMPATI (Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi) Kabupaten Sumedang, yang akan direplikasi di Kab. Sambas | Dokumen Kerjasama untuk Replikasi Aplikasi   | 1      | Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk replikasi aplikasi SIMPATI (Sistem Informasi Pencegahan Stunting terintegrasi) | Dokumen    | Dokumen Kerjasama untuk Replikasi Aplikasi   |        |       |        | 1     | 1     | Terkait   |                 |               | 75.000.000    | 75.000.000    | Bappeda                        | Bappeda                                      |   |
|    |   | Masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)  | Meningkatnya pengendalian penduduk  | Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                               | 4      | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga  | laporan    | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga link portal data keluarga risiko stunting: <a href="https://portalpk22-pdn.bkkbn.go.id/ta bulasi">https://portalpk22-pdn.bkkbn.go.id/ta bulasi</a> |        | 2     |        | 2     | 4     | Terkait   |                 | 20.400.000    | 68.100.000    | 68.100.000    | 156.600.000                    | Dinas Pemberdayaan Perempua n, PA, PP dan KB | Dinas Pemberdayaa n Perempua n, PA, PP dan KB |

| No | Tema | Permasalahan | Sasaran  | Indikator   | Target | Rencana Aksi   | Output     |   | Target |       |        |       |       | Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama) | Jumlah Anggaran |             |            |            |             | Unit/Satuan Kerja Pelaksana                 |   |
|----|------|--------------|--|---|--------|--|------------|---|--------|-------|--------|-------|-------|---|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|---|---|
|    |      |              |  |   |        |  | Satuan     | Indikator   | TW I   | TW II | TW III | TW IV | Total |   | TW I            | TW II       | TW III     | TW IV      | Total       | Koordinator                                 | Pelaksana                                   |
|    |      |              | Meningkatnya kualitas keluarga                         | Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKE)  | 193    | Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKE  | Organisasi | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana   | 50     | 100   | 150    | 193   | 493   | Terkait   |                 | 152.000.000 | 91.200.000 | 60.800.000 | 304.000.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB |
|    |      |              |  | Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana ((Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKE) | 19     | Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBP untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKE/PLKE) | Laporan    | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana                           | 5      | 5     | 5      | 4     | 19    | Terkait   |                 | 21.392.633  | 23.390.000 |            | 44.782.633  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB |
|    |      |              |  | Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya  | 19     | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya   | Laporan    | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya   | 5      | 5     | 5      | 4     | 19    | Terkait   |                 | 17.000.000  |            |            | 17.000.000  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB |
|    |      |              |  | Terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan   | 380    | Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan  | Orang      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan | 95     | 95    | 95     | 95    | 380   | Terkait   | 50.000.000      |             |            |            | 50.000.000  | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB |
|    |      |              | Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar | Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya   | 100    | Kampanye Materindu   | Orang      | Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya   |        |       |        | 100   | 100   | Terkait   | -               | -           | -          | 46.214.562 | 46.214.562  | Dinas Kesehatan                             | Dinas Kesehatan                             |

| No  | Tema                       | Permasalahan  | Sasaran  | Indikator   | Target  | Rencana Aksi   | Output        |   | Target |       |        |               |       | Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama) | Jumlah Anggaran |               |               |   |                                    | Unit/Satuan Kerja Pelaksana        |                                    |
|---|----------------------------|---|--|---|---------|--|---------------|---|--------|-------|--------|---------------|-------|---|-----------------|---------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   |                            |   |  |   |         |  | Satuan        | Indikator   | TW I   | TW II | TW III | TW IV         | Total |   | TW I            | TW II         | TW III        | TW IV   | Total                              | Koordinator                        | Pelaksana                          |
|   |                            |   |  |   |         |  |               |   |        |       |        |               |       |   |                 |               |               |   |                                    |                                    |                                    |
| 4   | Inflasi                    | Masih sering terjadinya kenaikan harga barang pokok penting di Kab. Sambas      | Meningkatnya suply barang sesuai permintaan masyarakat di kab. Sambas        | Jumlah Pengadaan bibit ternak   | 3       | Memberikan bantuan ternak (sapi,kambing, dan itik) kepada peternak di Kabupaten Sambas                       | Kelompok tani | Jumlah peternak yang mendapatkan bantuan  |        |       | 3      |               | 3     | Terkait   |                 |               | 179.000.000   |   | 179.000.000                        | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH |
|   |                            | Masih kurangnya stok pangan atau barang pokok dan barang penting di Kab. Sambas | Meningkatnya produksi pangan dan ternak di Kab. Sambas                       | Jumlah Kegiatan peningkatan produksi pangan dan ternak di Kab. Sambas | 1       | Pengawasan dan Penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran Hewan dan Produk Hewan      | Laporan       | Jumlah Laporan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan |        |       |        | 1             | 1     | Tidak Terkait   |                 |               | 14.823.729    | 14.823.729                                      | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH |                                    |
|   |                            |   |  |   | 9       | Penjaminan Peredaran Benih / Bibit Ternak  | Petugas IB    | Jumlah benih/bibit ternak yang beredar  |        |       |        | 9             | 9     | Tidak Terkait   |                 |               | 20.754.500    | 20.754.500                                      | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH |                                    |
|   |                            |   |  |   | 12      | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian   | Laporan       | Jumlah laporan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian   | 3      | 3     | 3      | 3             | 12    | Tidak Terkait   | 14.500.000      | 14.500.000    | 14.500.000    | 14.523.840                                      | 58.023.840                         | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH |
|   |                            |   |  |   | 11      | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota                              | Paket         | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang telah disediakan                             |        | 7     | 4      |               | 11    | Tidak Terkait   |                 | 855.362.726   | 153.000.000   |   | 1.008.362.726                      | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH |
|   |                            | Masih kurangnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Sambas                   | Meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Sambas                   | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab. Sambas yang diadakan           | 10      | Pengadaan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Kabupaten/Kota  | Ton           | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota  |        | 5     | 5      |               | 10    | Terkait   |                 |               | 66.000.000    |   | 66.000.000                         | Dinas Pertanian dan KP             | Dinas Pertanian dan KP             |
|   |                            | Masih kurangnya kapasitas produksi kelembagaan di Kab. Sambas                   | Jumlah kelembagaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas penyuluhan | Jumlah Kapasitas Produksi   | 19      | kapasitas kelembagaan penyuluhan yang di fasilitasi  | BPP           | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang di terfasilitasi   | 3      | 6     | 6      | 4             | 19    | Tidak Terkait   | 47.918.000      | 95.836.000    | 79.863.000    | 79.863.000                                      | 303.480.000                        | Dinas Pertanian dan KP             | Dinas Pertanian dan KP             |
|   |                            | Masih belum lancarnya distribusi barang pokok penting                           | Peningkatan Infrastruktur Perdagangan  | Jumlah Pembangunan infrastruktur yang baik                            | 3.000   | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/Koa   | Jumlah        | Jumlah perlengkapan jalan kabupaten yang tersedia   |        | 1.000 | 1.000  | 1.000         | 300   | Tidak Terkait   |                 | 3.885.625.500 | 3.885.625.500 | 3.885.625.500                                   | 11.656.876.500                     | Dinas Perhubungan                  | Dinas Perhubungan                  |
|   |                            |   |  |   | 33      | Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian  | unit          | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara  |        |       | 26     |               | 26    | Tidak Terkait   |                 |               | 3.290.400.000 |   | 3.290.400.000                      | Dinas Pertanian dan KP             | Dinas Pertanian dan KP             |
|   |                            |   |  |   |         |  | unit          | Jumlah Lantai Jemur yang dibangun   |        |       |        | 7             | 7     | Tidak Terkait   |                 |               | 342.300.000   |   | 342.300.000                        | Dinas Pertanian dan KP             | Dinas Pertanian dan KP             |
| Masih belum lancarnya komunikasi dan informasi data | Meningkatkan Kualitas Data | Jumlah data dan informasi yang tersedia   | 5  | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                        | Dokumen | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia |               | 1   |        |       | 1      | Tidak Terkait |       | 7.345.190   |                 |               | 7.345.190     | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Dinas Perikanan, Peternakan dan KH |                                    |                                    |

| No | Tema | Permasalahan   | Sasaran  | Indikator  | Target | Rencana Aksi  | Output  |  | Target |       |        |       |       | Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama) | Jumlah Anggaran |            |             |             |             | Unit/Satuan Kerja Pelaksana                        |  |
|----|------|--|--|--|--------|---|---------|--|--------|-------|--------|-------|-------|---|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
|    |      |  |  |  |        |   | Satuan  | Indikator  | TW I   | TW II | TW III | TW IV | Total |   | TW I            | TW II      | TW III      | TW IV       | Total       | Koordinator  | Pelaksana  |
|    |      |  |  |  |        | Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B   | Dokumen | Jumlah Dokumen Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B  |        | 1     |        |       | 1     | Tidak Terkait   |                 | 25.332.000 | 12.666.000  | 12.666.000  | 50.664.000  | Dinas Pertanian dan KP                             | Dinas Pertanian dan KP                             |
|    |      |  |  |  |        | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota   | Dokumen | Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota   |        |       |        | 1     | 1     | Tidak Terkait   |                 |            | 7.499.500   | 7.499.500   | 14.999.000  | Dinas Pertanian dan KP                             | Dinas Pertanian dan KP                             |
|    |      |  |  |  |        | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan  | Dokumen | Jumlah Dokumen Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan  |        |       |        | 1     | 1     | Tidak Terkait   |                 |            | 10.087.000  | 10.087.000  | 20.174.000  | Dinas Pertanian dan KP                             | Dinas Pertanian dan KP                             |
|    |      |  |  |  |        | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan  | Dokumen | Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan   |        |       |        | 1     | 1     | Tidak Terkait   |                 |            | 20.318.500  | 20.318.500  | 40.637.000  | Dinas Pertanian dan KP                             | Dinas Pertanian dan KP                             |
|    |      |  | Mengendalikan Ekspektasi Inflasi   | Jumlah Dokumen Pelaksanaan dalam Pengendalian Ekspektasi Inflasi   | 1      | Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                         | Dokumen | Jumlah Dokumen Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                     |        |       |        | 1     | 1     | Tidak Terkait   |                 | 50.000.000 | 120.000.000 | 157.669.000 | 327.669.000 | Dinas Pertanian dan KP                             | Dinas Pertanian dan KP                             |
|    |      | Faktor Luasnya wilayah Kabupaten Sambas sehingga jumlah pelaku usaha yang dijadikan responden untuk pengumpulan data harga belum bisa mewakili kondisi harga yang sebenarnya di Kabupaten Sambas | Meningkatkan stabilitas ketersediaan barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting         | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                        | 12     | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                  | Laporan | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                        | 3      | 3     | 3      | 3     | 12    | Tidak Terkait   |                 |            | 74.955.033  |             | 74.955.033  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |  | Meningkatkan stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab. Sambas | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12     | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 3      | 3     | 3      | 3     | 12    | Tidak Terkait   |                 |            | 119.160.683 |             | 119.160.683 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |  | Meningkatkan Stabilitas harga pupuk dan pertisida bersubsidi                           | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%                                      | 12     | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi   | Laporan | Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi  | 3      | 3     | 3      | 3     | 12    | Tidak Terkait   |                 |            | 59.595.608  |             | 59.595.608  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |

| No | Tema  | Permasalahan  | Sasaran   | Indikator   | Target | Rencana Aksi  | Output  |  | Target |       |        |       |       | Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama) | Jumlah Anggaran |                |                |                |  | Unit/Satuan Kerja Pelaksana                        |  |
|----|---|---|---|---|--------|---|---------|--|--------|-------|--------|-------|-------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
|    |   |   |   |   |        |   | Satuan  | Indikator  | TW I   | TW II | TW III | TW IV | Total |   | TW I            | TW II          | TW III         | TW IV          | Total  | Koordinator  | Pelaksana  |
|    |   | Pada saat stok barang berkurang atau saat banyaknya permintaannya, seperti saat perayaan agama harga barang penting atau kebutuhan pokok harga cenderung akan terjadi kenaikan. | Meningkatkan stabilitas stok barang di masyarakat     | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 2      | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota   | Laporan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar   |        | 1     |        | 1     | 2     | Terkait   |                 | 348.626.956    |                |                | 348.626.956  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |   |   | Meningkatkan sarana distribusi perdagangan            | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan  | 5      | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Unit    | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang diadakan   |        | 4     | 1      |       | 5     | Terkait   |                 | 1.137.216.142  |                |                | 1.137.216.142                                      | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |   |   |   | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | 35     | Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Pasar   | Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | 10     | 10    | 15     |       | 35    | Terkait   |                 |                | 329.336.792    |                | 329.336.792  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |   |   |   | Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                        | 12     | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  | dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 3      | 3     | 3      | 3     | 12    | Tidak Terkait Langsung  |                 |                | 305.664.450    |                | 305.664.450  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |   |   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                  | 12     | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  | Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | 3      | 3     | 3      | 3     | 12    | Tidak Terkait   |                 |                | 129.385.610    |                | 129.385.610  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |   | Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya dalam setahun penggunaannya bisa mengalami kerusakan, tidak sesuai standar  | Meningkatkan kualitas perlengkapan sarana perdagangan | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                  | 1.200  | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang  | Jumlah  | Jumlah Alat Perdagangan yang ditera ulang  | 300    | 300   | 300    | 300   | 1.200 | Terkait   |                 | 188.925.925    |                | 188.925.925    | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |  |
|    |   |   |   | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina   | 10     | Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal  | orang   | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                      | 2      | 3     | 2      | 3     | 10    | Terkait   |                 | 30.810.833     |                | 30.810.833     | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |  |
| 5  | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) | Masih minimnya SDM di Kabupaten Sambas sehingga penyedia e-katalog banyak yang berasal dari luar sambas   | Meningkatnya Tata Kelola E-katalog Kabupaten Sambas   | Jumlah Dokumen E-Katalog Kabupaten Sambas yang disusun  | 4      | Penyusunan Dokumen Etalase lokal Kabupaten Sambas yang disusun:<br>1. SK Etalase produk preservasi jalan Kabupaten Sambas<br>2. SK Etalase produk Meubelera<br>3. SK Etalase produk aplikasi, perangkat lunak dan jaringan<br>4. SK Etalase produk perlengkapan kantor dan meubelair. | Dokumen |  |        | 2     | 2      |       | 4     | Tidak Terkait   | 40.950.970.000  | 40.950.970.000 | 40.950.970.000 | 40.950.970.000 | 163.803.880.000                                    | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                   | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                   |

| No | Tema | Permasalahan  | Sasaran                           | Indikator   | Target | Rencana Aksi  | Output  |  | Target |       |        |       |       | Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama) | Jumlah Anggaran |            |            |            |            | Unit/Satuan Kerja Pelaksana                        |  |
|----|------|---|-----------------------------------|---|--------|---|---------|--|--------|-------|--------|-------|-------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
|    |      |   |                                   |   |        |   | Satuan  | Indikator  | TW I   | TW II | TW III | TW IV | Total |   | TW I            | TW II      | TW III     | TW IV      | Total      | Koordinator  | Pelaksana  |
|    |      |   |                                   | Jumlah jenis etalase E-katalog lokal kabupaten                            | 42     | Jumlah jenis etalase E-katalog  | Etalase | Jumlah jenis etalase E-katalog                                     |        | 42    |        |       | 42    | Tidak terkait   | 21.999.999      | 21.999.999 | 21.999.999 | 21.999.999 | 87.999.996 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                   | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                   |
|    |      | Penggunaan Produk Dalam Negeri pada proses pengadaan barang dan jasa pada organisasi perangkat daerah yang masih belum sesuai target. | Meningkatnya pertumbuhan industri | Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Program Produk Dalam Negeri (P3DN) | 1      | Pelaksanaan Sosialisasi Program Produk Dalam Negeri ((P3DN) kepada KPA/PPK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas | Dokumen | Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Program Produk Dalam Negeri |        | 1     |        |       | 1     | Terkait   |                 | 70.000.000 |            |            | 70.000.000 | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |



BUPATI SAMBAS,  
 TTD  
 SATONO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 19 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI  
 BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

| No  | Kegiatan Utama  | Indikator KU  | Target Tahun 2024 | Rencana Aksi  | Output                           |  | Target                                  |       |        |       |       | Jumlah Anggaran |             |             |                   |                   | Unit/Satuan Kerja Pelaksana |                   |
|---|---|---|-------------------|---|----------------------------------|--|---|-------|--------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|   |   |   |                   |   | Satuan                           | Indikator  | TW I                                    | TW II | TW III | TW IV | Total | TW I            | TW II       | TW III      | TW IV             | Total             | Koordinator                 | Pelaksana         |
| <b>Sasaran Strategis I : Terciptanya tata kelola pemerintah digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel</b> |   |   |                   |   |                                  |  |   |       |        |       |       |                 |             |             |                   |                   |                             |                   |
| 1   | Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi / Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile | Persentase Penyederhanaan Birokrasi/Struktur Organisasi Perangkat Daerah  | 100               | Melaksanakan Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah dan Penyetaraan Jabatan                                      | Perangkat Daerah                 | Jumlah Perangkat Daerah yang selesai dilaksanakan penyederhanaan birokrasi | 21                                      |       |        |       | 21    | 50.000.000      |             |             |                   | 50.000.000        | Bagian Organisasi           | Bagian Organisasi |
|   |   |   |                   |   | Jabatan                          | Jumlah Jabatan yang selesai dilakukan Penyetaraan Jabatan Fungsional       | 244                                     |       |        |       | 244   | 50.000.000      |             |             |                   | 50.000.000        | Bagian Organisasi           | Bagian Organisasi |
| 2   | Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Modal Fleksibel bagi Pegawai ASN   | Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja          | 75                | Percepatan Implementasi Mekanisme Kerja   | Dokumen                          | Jumlah Dokumen Pedoman Mekanisme Kerja yang Disusun                        |   |       | 1      | 1     |       |                 | 15.000.000  |             | 15.000.000        | Bagian Organisasi | Bagian Organisasi           |                   |
|   |   |   |                   | Sosialisasi sistem kerja  | Kegiatan                         | Jumlah sosialisasi sistem kerja  |   |       | 1      | 1     |       |                 | 25.000.000  |             | 25.000.000        | Bagian Organisasi | Bagian Organisasi           |                   |
| 3   | Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional  | Indeks SPBE   | 2,8               | Menyusun dokumen Proses Bisnis SPBE   | Dokumen                          | Jumlah dokumen arsitektur SPBE yang tersusun                               |   |       |        | 1     | 1     |                 |             | 100.000.000 | 100.000.000       | Diskominfo        | Diskominfo                  |                   |
| 4   | Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi                                    | Nilai SAKIP   | 70 ( BB)          | Penguatan Implementasi SAKIP  | Persentase                       | Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen SAKIP Minimal Baik     |   | 80    |        |       | 80    |                 | 25.000.000  |             | 25.000.000        | Bagian Organisasi | Bagian Organisasi           |                   |
|   |   |   |                   |   | Persentase                       | Persentase Perangkat Daerah dengan penyampaian dokumen SAKIP tepat waktu   | 100                                     |       |        |       | 100   | 25.000.000      |             | 25.000.000  | Bagian Organisasi | Bagian Organisasi |                             |                   |
|   |   |   |                   |   | Percepatan perbaikan TL LHE AKIP | Rekomendasi  | Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti |       |        | 4     | 4     |                 | 25.000.000  |             | 25.000.000        | Bagian Organisasi | Bagian Organisasi           |                   |
| 5   | Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja   | Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona                                     | 75                | Pendampingan dan penilaian Zona Integritas terhadap 2 OPD   | Nilai                            | Rata-rata Capaian Nilai Zona Integritas                                    |   | 70    |        | 70    |       | 66.000.000      |             | 66.000.000  | Inspektorat       | Inspektorat       |                             |                   |
| 6   | Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)   | Tingkat Maturisasi SPIP   | 3                 | Pendampingan Pengisian SPIP   | Level                            | Nilai Maturitas SPIP   |   |       |        | 3     | 3     |                 | 99.999.519  | 99.999.519  | Inspektorat       | Inspektorat       |                             |                   |
| 7   | Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat  | Tingkat Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan | 100               | Peningkatan sosialisasi informasi pelayanan pengaduan SP4N-LAPOR  | Kegiatan                         | Jumlah sosialisasi yang terlaksana   | 1                                       | 3     | 5      | 7     | 16    | 5.000.000       | 15.000.000  | 25.000.000  | 35.000.000        | 80.000.000        | Diskominfo                  | Diskominfo        |
|   |   |   |                   | Pengawasan Pengaduan Masyarakat yang terlayani  | Persentase                       | Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti                                  | 25                                      | 50    | 75     | 100   | 250   | 232.500.000     | 232.500.000 | 232.500.000 | 232.500.000       | 930.000.000       | Diskominfo                  | Inspektorat       |
| 8   | Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi  | Survei Penilaian Integritas   | 75                | Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas   | Persentase                       | Capaian SPI  |   |       |        | 75    | 75    |                 |             |             | 224.983.972       | 224.983.972       | Inspektorat                 | Inspektorat       |
|   |   |   |                   |   | Jumlah                           | Laporan Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas                          |   |       | 1      | 1     |       | 25.000.000      |             | 25.000.000  | Inspektorat       | Inspektorat       |                             |                   |
| 9   | Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik  | Indeks Kualitas Kebijakan   | BAIK              | Melaksanakan fasilitasi dan harmonisasi dalam pembentukan peraturan di Daerah                                       | Dokumen                          | jumlah Peraturan yang ditetapkan sesuai Propemperda dan Propemperbup       | 5                                       | 5     | 5      | 5     | 20    | 21.000.000      | 24.000.000  | 23.000.000  | 25.333.148        | 93.333.148        | Bagian Hukum                | Bagian Hukum      |
| 10  | Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  | Indeks reformasi hukum  | CUKUP BAIK        | melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata kelola kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan | Dokumen                          | jumlah Peraturan di Daerah yang dilakukan analisis dan evaluasi            | 0                                       | 2     | 2      | 2     | 6     | -               | 23.000.000  | 44.000.000  | 23.000.000        | 90.000.000        | Bagian Hukum                | Bagian Hukum      |

| No | Kegiatan Utama                                 | Indikator KU                       | Target Tahun 2024 | Rencana Aksi   | Output         |   | Target |       |        |       |            | Jumlah Anggaran |                |                |                |                             | Unit/Satuan Kerja Pelaksana      |                                  |                       |                       |
|----|--|------------------------------------|-------------------|--|----------------|---|--------|-------|--------|-------|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|    |  |                                    |                   |  | Satuan         | Indikator   | TW I   | TW II | TW III | TW IV | Total      | TW I            | TW II          | TW III         | TW IV          | Total                       | Koordinator                      | Pelaksana                        |                       |                       |
| 11 | Pelaksanaan Arsip Digital                      | Tingkat Digitalisasi Arsip         | 65                | Alih media arsip   | Persentase     | Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | 10     | 15    | 20     | 20    | 65         | 8.082.846       | 10.277.041     | 10.277.042     | 10.277.042     | 38.913.971                  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                       |                       |
| 12 | Pelaksanaan Data Statistik Sektoral            | Tingkat Kematangan penyelenggaraan | 100               | Pengembangan aplikasi data sektoral Kabupaten Sambas   | Aplikasi       | Jumlah aplikasi data sektoral yang dikembangkan                 | 0      | 0     | 1      | 0     | 1          |                 |                | 148.328.592    | 148.328.592    | Diskominfo                  | Seluruh OPD                      |                                  |                       |                       |
| 12 | Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah | Indeks Tata Kelola Pengadaan       | 70,25             | Pemanfaatan Sistem Pengadaan   | Nilai (Max 30) | Nilai Sistem Pengadaan Secara Elektronik                        | 11     | 3     | 3      | 3     | 20         | 69.999.665      | 69.999.665     | 69.999.665     | 69.999.665     | 279.998.660                 | Bagian Pengadaan Barang dan      | Bagian Pengadaan Barang dan      |                       |                       |
|    |  |                                    |                   | Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ   | Nilai (Max 30) | Jumlah JF PPEJ Kabupaten Sambas                                 | 13,5   |       | 1,5    | 15    | 45.000.318 | 45.000.318      | 45.000.318     | 45.000.318     | 180.001.272    | Bagian Pengadaan Barang dan | Bagian Pengadaan Barang dan      |                                  |                       |                       |
|    |  |                                    |                   | Penguatan Tingkat Kematangan UKPBJ   | Nilai (Max 40) | Nilai Pencapaian Level Kematangan                               | 33     |       | 0,75   | 1,5   | 35,25      | 434.999.953     | 434.999.953    | 434.999.953    | 434.999.953    | 1.739.999.812               | Bagian Pengadaan                 | Bagian Pengadaan                 |                       |                       |
| 13 | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset        | Opini BPK                          | WTP               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Tepat Waktu  | Dokumen        | Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran                             | 44     |       |        |       | 44         | 53.863.411      |                |                |                | 53.863.411                  | Badan Keuangan Daerah            | Badan Pengadaan Barang dan       |                       |                       |
|    |  |                                    |                   | Rekonsiliasi Keuangan dan Aset tepat waktu   | Dokumen        | Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Per Triwulan                   | 1      | 1     | 1      | 1     | 4          | 5.387.774       | 5.387.774      | 5.387.774      | 5.387.774      | 21.551.096                  | Badan Keuangan                   | Badan Keuangan                   |                       |                       |
|    |  |                                    |                   | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tepat Waktu   | Laporan        | Jumlah Laporan Keuangan Semester I                              |        |       | 1      |       |            | 1               |                |                | 13.726.048     |                             |                                  | 13.726.048                       | Badan Keuangan Daerah | Badan Keuangan Daerah |
|    |  |                                    |                   | Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu                                    | Laporan        | Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                       | 1      |       |        |       |            | 1               | 114.523.953    |                |                |                             |                                  | 114.523.953                      | Badan Keuangan Daerah | Badan Keuangan Daerah |
|    |  |                                    |                   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD tepat waktu dan sesuai                                  | Laporan        | Jumlah Laporan RKBMD  |        | 1     |        |       |            | 1               |                | 147.670.733    |                |                             |                                  | 147.670.733                      | Badan Keuangan Daerah | Badan Keuangan Daerah |
|    |  |                                    |                   | Penyusunan Laporan BMD sesuai SAP dan Regulasi Pengelolaan                                   | Laporan        | Jumlah Laporan BMD Semester I dan Semester II                   |        | 1     |        |       | 1          | 2               |                | 118.886.849    |                |                             | 118.886.849                      | 237.773.698                      | Badan Keuangan Daerah | Badan Keuangan Daerah |
|    |  |                                    |                   | Pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan yang berlaku | Persentase     | Persentase Penyelesaian Dokumen BMD yang diusulkan              | 25     | 25    | 25     | 25    | 100        | 74.461.948.250  | 74.461.948.250 | 74.461.948.250 | 74.461.948.250 | 74.461.948.250              | 297.847.793.000                  | Badan Keuangan Daerah            | Badan Keuangan Daerah |                       |
|    |  |                                    |                   | Pelaksanaan Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah                                    | Persentase     | Persentase Penerbitan sertifikat                                | 10     | 30    | 40     | 20    | 100        | 48.255.950      | 144.767.850    | 193.023.800    | 95.511.900     | 481.559.500                 | Badan Keuangan Daerah            | Badan Keuangan Daerah            |                       |                       |

**Sasaran Strategis 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK ASN yang Profesional**

|   |                        |                     |              |  |            |  |      |     |  |     |      |            |            |            |             |             |             |          |          |
|---|------------------------|---------------------|--------------|--|------------|--|------|-----|--|-----|------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| 1 | Penguatan Sistem Merit | Indeks Sistem Merit | 281,5 (baik) | Melaksanakan pengumpulan data dan pengukuran Indeks Sistem Merit | Persentase | Persentase realisasi formasi CPNS  |      |     |  | 100 | 100  |            |            |            | 268.926.203 | 268.926.203 | BKPSDMAD    | BKPSDMAD |          |
|   |                        |                     |              |  | Persentase | Persentase pengisian jabatan struktural  | 85   |     |  |     | 85   | 21.980.164 |            |            |             | 21.980.164  | BKPSDMAD    | BKPSDMAD |          |
|   |                        |                     |              |  | Orang      | Jumlah PNS yang diasesment Tahun Berjalan  |      | 153 |  |     | 153  |            | 35.000.000 | 70.000.000 | 45.000.000  | 150.000.000 | BKPSDMAD    | BKPSDMAD |          |
|   |                        |                     |              |  | Persentase | Persentase data pegawai yang terintegrasi dengan sistem database kepegawaian secara online |      |     |  |     | 100  | 100        |            |            |             | 115.000.000 | 115.000.000 | BKPSDMAD | BKPSDMAD |
|   |                        |                     |              |  | Orang      | Jumlah pejabat fungsional yang diangkat  | 1003 |     |  |     | 1003 | 22.600.000 |            |            |             | 22.600.000  | BKPSDMAD    | BKPSDMAD |          |
|   |                        |                     |              |  | persentase | Persentase PNS yang menyampaikan laporan kinerja   | 50   | 50  |  |     |      | 100        | 50.000.000 | 50.000.000 |             |             | 100.000.000 | BKPSDMAD | BKPSDMAD |

| No | Kegiatan Utama                     | Indikator KU                               | Target Tahun 2024 | Rencana Aksi   | Output           |   | Target           |  |        |       |       | Jumlah Anggaran |            |            |                   |                   | Unit/Satuan Kerja Pelaksana |                   |
|----|------------------------------------|--|-------------------|--|------------------|---|------------------|--|--------|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|    |                                    |  |                   |  | Satuan           | Indikator   | TW I             | TW II  | TW III | TW IV | Total | TW I            | TW II      | TW III     | TW IV             | Total             | Koordinator                 | Pelaksana         |
| 2  | Pelaksanaan Core Values ASN        | Indeks BerAKHLAK                           | 75 (A)            | Sosialisasi Survei Budaya Kerja ASN                              | Jumlah           | Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Survei Budaya Kerja ASN  |                  | 1  |        |       | 1     |                 |            | 25.000.000 |                   | 25.000.000        | Bagian Organisasi           | Bagian Organisasi |
|    |                                    |  |                   | Pengisian Survei Budaya Kerja ASN                                | Persentase       | Persentase Pegawai yang mengisi Survei Budaya Kerja ASN |                  |  | 40     |       | 40    |                 |            | 12.000.000 |                   | 12.000.000        | Bagian Organisasi           | Bagian Organisasi |
|    |                                    |  |                   | Penguatan Implementasi Budaya Kerja                              | Persentase       | Persentase PD yang telah internalisasi budaya kerja     |                  |  |        | 75    | 75    |                 |            |            | 30.000.000        | 30.000.000        | Bagian Organisasi           | Bagian Organisasi |
| 3  | Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima | Indeks Pelayanan Publik                    | 3,8               | Pendampingan Unit Lokus Evaluasi                                 | Perangkat daerah | Jumlah PD yang dilakukan pembinaan                      |                  | 3  |        |       | 3     |                 | 35.000.000 |            | 35.000.000        | Bagian Organisasi | Bagian Organisasi           |                   |
|    |                                    |  |                   | Pendampingan Unit Lokus Penilaian                                | Jumlah           | Jumlah PD yang dilakukan pembinaan                      |                  |  |        | 6     | 6     |                 |            | 50.000.000 | 50.000.000        | Bagian Organisasi | Bagian Organisasi           |                   |
|    |                                    | Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | 85                | Peningkatan Kolaborasi Pengawasan dan penilaian pelayanan Publik | Dokumen          | Jumlah MOU Kerjasama dengan Ombudsman                   |                  |  |        | 1     | 1     |                 |            | 35.000.000 | 35.000.000        | Bagian Organisasi | Bagian Organisasi           |                   |
|    |                                    |  |                   | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)                                 | 90               | Percepatan Penyusunan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat  | Perangkat daerah | Jumlah PD dan UPTD yang menyampaikan Laporan SKM Tepat Waktu |        | 50    |       | 50              | 100        |            | 20.000.000        | 15.000.000        | 35.000.000                  | Bagian Organisasi |
|    |                                    | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi        | Persentase        | Persentase PD yang menindaklanjuti hasil SKM                     |                  |   |                  |  | 75     | 75    |       |                 | 50.000.000 | 50.000.000 | Bagian Organisasi | Bagian Organisasi |                             |                   |



Sallman sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ERWANTO S.H**  
 NIP. 19740506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 19 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020-2024

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

| No | Tema                   | Permasalahan   | Sasaran  | Indikator   | Target                                   | Rencana Aksi   | Output                     |  | Target  |         |        |                                    |                                    | Jenis Kegiatan aksi* (terkait/tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholders utama) | Jumlah Anggaran |             |             |             |               | Unit/Satuan Kerja Pelaksana |             |
|----|------------------------|--|--|---|--|--|----------------------------|--|---------|---------|--------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------|
|    |                        |  |  |   |  |  | Satuan                     | Indikator  | TW I    | TW II   | TW III | TW IV                              | Total                              |   | TW I            | TW II       | TW III      | TW IV       | Total         | Koordinator                 | Pelaksana   |
| 1  | Pengentasan Kemiskinan | Masih rendahnya pemahaman SDM ditingkat aparat ataupun tenaga teknis pendukung kegiatan baik yang berada di kecamatan dan desa dalam pelaksanaan tertib adminduk sesuai prosedur yang telah ditetapkan | Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk           | Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan      | 86,5 Persen                              | Pelaksanaan Program Pendaftaran Penduduk                                 | Persentase                 | Persentase kepemilikan kartu keluarga (KK), Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA), Persentase kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP-el)  | 21,62   | 21,62   | 21,62  | 21,64                              | 86,5                               | Terkait langsung dengan masyarakat  | 323.354.870     | 323.354.870 | 323.354.870 | 323.354.870 | 1.293.419.480 | BAPPEDA                     | DISDUKCAPIL |
|    |                        | Masih kurangnya ketersediaan masyarakat mengenai pentingnya akta pencatatan sipil  | Meningkat kualitas dan cakupan pelayanan pencatatan sipil                  | Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk | 50,83 Persen                             | Pelaksanaan Program Pencatatan sipil                                     | Persentase                 | Persentase bayi berakta kelahiran, persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, persentase kepemilikan akta kelahiran, persentase kepemilikan akta perkawinan, persentase kepemilikan akta perceraian, persentase kepemilikan akta kematian | 17,7    | 7,7     | 12,7   | 12,73                              | 50,83                              | Terkait langsung dengan masyarakat  | 67.126.615      | 67.126.615  | 67.126.615  | 67.126.625  | 268.506.470   | BAPPEDA                     | DISDUKCAPIL |
|    |                        | Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dalam melakukan update data kependudukan   | Meningkatnya pengelolaan SIAK yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel | Cakupan penerapan SIAK se Kabupaten Sambas  | 99,95 Persen                             | Pelaksanaan Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan      | Persentase                 | Persentase penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan  | 24,98   | 25,02   | 25     | 24,95                              | 99,95                              | Terkait langsung dengan masyarakat  | 92.934.732      | 92.934.732  | 92.934.732  | 92.934.735  | 371.738.931   | BAPPEDA                     | DISDUKCAPIL |
|    |                        | Masih belum optimalnya pemanfaatan Produksi Perikanan dalam Upaya Meningkatkan Laju PDRB di Sektor Perikanan   | Meningkatnya Produksi Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan)        | Jumlah produksi perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan)                           | 24.370 Ton                               | Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap                                | Ton                        | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)  | 5.000   | 5.250   | 5.500  | 6.280                              | 22030                              | Terkait langsung dengan masyarakat  | 119.809.000     | 119.809.000 | 119.809.000 | 119.809.000 | 479.236.000   | BAPPEDA                     | DPPKH       |
|    |                        |  |  | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya  |  | Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya                               | Ton                        | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya   | 500     | 520     | 640    | 680                                | 2.340                              | Terkait langsung dengan masyarakat  | 476.950.000     | 476.950.000 | 476.950.000 | 476.950.000 | 1.907.800.000 | BAPPEDA                     | DPPKH       |
|    |                        |  | Jumlah Produksi Pengolahan   | 250 Ton   | Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Ton  | Jumlah Produksi Pengolahan | 60   | 62      | 64      | 64     | 250                                | Terkait langsung dengan masyarakat | 25.000.000  | 25.000.000      | 25.000.000  | 25.000.000  | 100.000.000 | BAPPEDA       | DPPKH                       |             |
|    |                        |  | Meningkatnya Produksi Peternakan   | Jumlah Peningkatan Produksi Peternakan  | 3.677.486 Ekor                           | Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                             | Ekor                       | Jumlah Populasi Ternak   | 850.000 | 900.000 | 950000 | 977.486                            | 3.677.486                          | Terkait langsung dengan masyarakat  | 373.375.000     | 373.375.000 | 373.375.000 | 373.375.000 | 1.493.500.000 | BAPPEDA                     | DPPKH       |
|    |                        | Pemanfaatan lahan perkarangan dan demplot sudah dilaksanakan namun pemanfaatan hasil sayur dan buah untuk konsumsi rumah tangga belum menjadi pola hidup yang rutin dilaksanakan di dalam rumah tangga | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah                                       | Indeks Ketahanan Pangan   | 57,69                                    | Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Keadaulatan dan Kemandirian Pangan | Persentase                 | Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten   |         |         |        | 79                                 | 79                                 | Terkait langsung dengan masyarakat  |                 |             |             | 670.331.987 | 670.331.987   | BAPPEDA                     | DISTANKP    |
|    |                        |  |  |   |  |  |                            |  |         |         |        |                                    |                                    |   |                 |             |             |             |               |                             |             |
|    |                        |  |  |   | Gr. Prot/Kap/ Hari                       | Jumlah Ketersediaan Protein  |                            |  |         | 79,6    | 80     | Terkait langsung dengan masyarakat |                                    |   |                 |             | BAPPEDA     | DISTANKP    |               |                             |             |



| No | Tema | Permasalahan   | Sesaran  | Indikator   | Target      | Rencana Aksi  | Output |   | Target  |         |         |         |           | Jenis Kegiatan<br>atau "terkait/tidak<br>terkait langsung/<br>dengan masyarakat/<br>stakeholders<br>(utama) | Jumlah Anggaran |               |               |               | Total          | Urut / Satuan Kerja Pelaksanaan | Pakswana |
|----|------|--|--|---|-------------|---|--------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------|
|    |      |  |  |   |             |   | Satuan | Indikator   | TW I    | TW II   | TW III  | TW IV   | Total     |   | TW I            | TW II         | TW III        | TW IV         |                |                                 |          |
|    |      | Data gender belum tersedia lengkap dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan pembangunan   | Meningkatkan penyediaan data gender dan anak untuk perencanaan pembangunan | Cakupan ketersediaan data gender dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan | 60          | Program Pengabdian Sistem Desa Gender   | Orang  | Penyentase ketersediaan data gender dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan  | 15      | 15      | 15      | 15      | 60        | Terkait langsung dengan masyarakat  | 3.081.808.800   | 3.081.808.800 | 3.081.808.800 | 3.081.808.800 | 12.327.235.200 | BA/PPEDA                        | DI/NKSS  |
|    |      | Masih banyaknya masyarakat kurang mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan keselamatan di Kabupaten Sambas   | Meningkatnya kepesertaan jaminan kesehatan                                 | Penyentase kepesertaan jaminan kesehatan                                    | 0/75 Persen | Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Pekerja Bukan Pekerja (PBBP) dan Bantuan Pekerja (PBP) Bfj yang Didahayakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Sambas | Orang  | Penyentase PBBP-BP  | 82.500  | 82.500  | 82.500  | 82.500  | 330.000   | Terkait langsung dengan masyarakat  | 3.081.808.800   | 3.081.808.800 | 3.081.808.800 | 3.081.808.800 | 12.327.235.200 | BA/PPEDA                        | DI/NKSS  |
|    |      | Masih rendahnya status gizi masyarakat   | Meningkatkan status gizi masyarakat  | Persentase Balita Pendek (PB/U) atau Stunting                               | 0,15 Persen | Pembayaran Bantuan Iuran Pekerja Bukan Pekerja Upah dan Bantuan Pekerja (PBBP-Bfj yang Didahayakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Sambas             | Orang  | Bunil KEK/ Bunil risiko KEK yang menerima makanan tambahan  | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 1.080.000 | Terkait langsung dengan masyarakat  | 865.200.000     | 865.200.000   | 865.200.000   | 865.200.000   | 3.460.800.000  | BA/PPEDA                        | DI/NKSS  |
|    |      | Terdapatnya keahlian personal dan sarana prasarana evakuasi dalam upaya pencucian, perlindungan dan evakuasi korban bencana  | Meningkatnya kewaspadaan dini yang berhasil diemban, terhadap bencana      | Diolong dan di evakuasi persnis kejadian bencana                            | 5 jiwa      | Peningkatan Penanggulangan Bencana  | Jawa   | Jumlah korban yang berhasil diemban, Diolong dan di evakuasi persnis kejadian bencana   | 1       | 1       | 1       | 2       | 5         | Terkait langsung dengan masyarakat  | 635.325.000     | 635.325.000   | 635.325.000   | 635.325.000   | 2.541.300.000  | BA/PPEDA                        | DI/NKSS  |
|    |      | Kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman warga yang tinggal di daerah rawan bencana terhadap jenis dan karakteristik bencana serta upaya penanganan bencana di wilayahnya | Meningkatnya kewaspadaan dini yang mondogel terhadap bencana               | Jumlah warga yang mondogel sebidang bencana                                 | 75.000 jiwa | Penyentase Penanggulangan Bencana   | Jawa   | Jumlah Warga yang Mendapatkan Sosialisasi Komunikasi dan Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota/ Per- jenis Bencana) Secara Terap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 18.750  | 18.750  | 18.750  | 18.750  | 75.000    | Terkait langsung dengan masyarakat  | 84.999.923      | 84.999.923    | 84.999.923    | 84.999.923    | 84.999.923     | BA/PPEDA                        | DI/NKSS  |
|    |      | Terdapatnya bantuan kewaspadaan dini yang mondogel dan perlindungan terhadap bencana   | Meningkatnya kewaspadaan dini yang mondogel terhadap bencana               | Jumlah warga yang mondogel bantuan korban bencana                           | 200 jiwa    | Bantuan Bencana   | Jawa   | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | 50      | 50      | 50      | 50      | 200       | Terkait langsung dengan masyarakat  | 631.443.254     | 631.443.254   | 631.443.254   | 631.443.254   | 631.443.254    | BA/PPEDA                        | DI/NKSS  |





| No | Tema | Permasalahan   | Seseren  | Indikator   | Target  | Rencana Aksi   | Output |  | Target |       |        |       |       | Jenis Kegiatan<br>Aksi* (terkait tidak<br>terkait langsung<br>dengan<br>masyarakat/<br>stakeholders<br>utama) | Jumlah Anggaran                       |       |        |                 | Unit/<br>Satuan Kerja<br>Pelayanan |               |         |        |
|----|------|--|--|---|---------|--|--------|--|--------|-------|--------|-------|-------|---|---------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------------------------------|---------------|---------|--------|
|    |      |  |  |   |         |  | Satuan | Indikator  | TW I   | TW II | TW III | TW IV | Total |   | TW I                                  | TW II | TW III | TW IV           |                                    | Total         |         |        |
|    |      | Perlu Peningkatan<br>Dermaga / Steiger di<br>beberapa kecamatan<br>untuk pemphubung<br>antar desa yang dilahi<br>Sungai  | Meningkatnya<br>Peningkatan<br>Pelabuhan<br>Sungai dan<br>Danau<br>Khususnya<br>diwilayah Kec.<br>Sambas, Kec.<br>Galing, Kec.<br>Teluk Kenamat,<br>Kec. Sekawi dan<br>Kec. Sajid  | Jumlah<br>Pelabuhan Sungai<br>dan Danau yang<br>Dibangun  | 25 Unit | Pembangunan<br>pelabuhan sungai<br>dan danau                       | Unit   | Jumlah Pelabuhan<br>Sungai dan Danau<br>yang Dibangun  |        |       |        |       | 25    | 25  | Terkait langsung<br>dengan masyarakat |       |        |                 | 2.533.207.850                      | 2.533.207.850 | BAPEEDA | DISHUB |
|    |      | Pertingnya<br>Pengoperasian Dermaga<br>/ Steiger beserta<br>peneliharaan untuk<br>penunjang aktivitas<br>warga melakukan<br>penyeberangan di<br>wilayah yang dilahi<br>sungai                              | Meningkatnya<br>Pengoperasian<br>dan<br>Peneliharaan<br>Pelabuhan<br>Sungai dan<br>Danau<br>Khususnya di<br>Wilayah<br>Kecamatan<br>Sempati  | Jumlah<br>Perbaikan dan<br>Peneliharaan<br>Pelabuhan Sungai<br>dan Danau  | 1 Unit  | Pengoperasian dan<br>Peneliharaan<br>Pelabuhan Sungai<br>dan Danau | Unit   | Jumlah<br>Perbaikan dan<br>Peneliharaan<br>Pelabuhan Sungai dan<br>Danau   |        |       |        |       | 1     | 1   | Terkait langsung<br>dengan masyarakat |       |        | 146.276.328     | 146.276.328                        | BAPEEDA       | DISHUB  |        |
|    |      | Perluaya Angkutan<br>umum untuk mobilitas<br>warga dari Desa ke<br>Kota ataupun<br>sebaliknya  | Meningkatnya<br>Penyediaan<br>Angkutan Umum<br>untuk Jasa<br>Angkutan Orang<br>dan/atau Barang<br>antar Kota Dalam<br>Satu Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>Khususnya di<br>Wilayah Kec.<br>Sambas, Kec.<br>Sempati, Kec.<br>Teluk Kenamat,<br>Kec. Sejangkung<br>dan Kec. Sekawi | Jumlah Armada<br>Angkutan Umum<br>untuk Jasa<br>Angkutan Orang<br>dan/atau Barang<br>antar Kota dalam<br>Satu (1) Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia | 4 Unit  | Peningkatan<br>Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan<br>(LLAJ)         | Unit   | Jumlah Armada<br>Angkutan Umum<br>untuk Jasa Angkutan<br>Orang dan/atau<br>Barang antar Kota<br>dalam Satu (1) Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Tersedia |        |       |        |       | 4     | 4   | Terkait langsung<br>dengan masyarakat |       |        | 391.781.435     | 391.781.435                        | BAPEEDA       | DISHUB  |        |
|    |      | Angka putus sekolah<br>yang masih tinggi<br>sehingga menyebabkan<br>IPM Kab. Sambas<br>masih sangat rendah<br>Khususnya Rata-Lama<br>Sekolah   | Bantuan<br>Beasiswa Peserta<br>Didik Rawan<br>Putus Sekolah<br>dan Peserta Didik<br>Meskin SD  | Jumlah Penerima<br>Beasiswa untuk<br>Peserta Didik<br>Rawan Putus<br>Sekolah dan<br>Peserta Didik<br>Meskin SD  | 200     | Penyediaan Biaya<br>Personil Peserta<br>Didik                      | orang  | Jumlah penerima<br>beasiswa  | 50     | 50    | 50     | 50    | 50    | 200   | Terkait langsung<br>dengan masyarakat |       |        | 480.000.000     | 480.000.000                        | BAPEEDA       | DISHUB  |        |
|    |      | Meningkatnya<br>penduduk usia<br>khususnya<br>masyarakat<br>makin dan<br>rentan, memiliki<br>hak yang sama<br>terhadap sumber<br>daya ekonomi,<br>serta akses<br>terhadap<br>pelayanan<br>pendidikan dasar | Bantuan<br>Beasiswa Peserta<br>Didik Rawan<br>Putus Sekolah<br>dan Peserta Didik<br>Meskin SMP   | Jumlah Penerima<br>Beasiswa untuk<br>Peserta Didik<br>Rawan Putus<br>Sekolah dan<br>Peserta Didik<br>Meskin SD  | 200     | Penyediaan Biaya<br>Personil Peserta<br>Didik                      | orang  | Jumlah penerima<br>beasiswa  | 50     | 50    | 50     | 50    | 50    | 200   | Terkait langsung<br>dengan masyarakat |       |        | 480.000.000,00  | 480.000.000                        | BAPEEDA       | DISHUB  |        |
|    |      | Meningkatnya<br>penduduk usia<br>khususnya<br>masyarakat<br>makin dan<br>rentan, memiliki<br>hak yang sama<br>terhadap sumber<br>daya ekonomi,<br>serta akses<br>terhadap<br>pelayanan<br>pendidikan dasar | Bantuan<br>Beasiswa Peserta<br>Didik Rawan<br>Putus Sekolah<br>dan Peserta Didik<br>Meskin SMP   | Jumlah Penerima<br>Beasiswa untuk<br>Peserta Didik<br>Rawan Putus<br>Sekolah dan<br>Peserta Didik<br>Meskin SD  | 200     | Penyediaan Biaya<br>Personil Peserta<br>Didik                      | orang  | Jumlah penerima<br>beasiswa  | 50     | 50    | 50     | 50    | 50    | 200   | Terkait langsung<br>dengan masyarakat |       |        | 166.905.362.556 | 166.905.362.556                    | BAPEEDA       | DISHUB  |        |

| No | Tema | Permasalahan | Sesaran   | Indikator   | Target   | Rencana Aksi  | Output       |  |      |       |        |       | Jenis Kegiatan<br>aksi (terkait/ tidak<br>terkait langsung<br>dengan masyarakat/<br>stakeholders<br>utama) | Jumlah Anggaran |       |                                    |        |       | Unit/ Satuan Kerja Pelaksanaan | Pelaksana          |                 |             |               |
|----|------|--------------|---|---|--|---|--------------|--|------|-------|--------|-------|--|-----------------|-------|------------------------------------|--------|-------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|
|    |      |              |   |   |  |   | Setoran      | Indikator  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  | Total           | TW I  | TW II                              | TW III | TW IV |                                |                    | Total           | Koordinator |               |
|    |      |              | Meningkatkan budaya semua penduduk usia sekolah, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan pendidikan dasar | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.   | 82,15  | Peningkatan infrastruktur dasar pendidikan dan Peningkatan kualitas mutu pendidikan | Angka        | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.          |      |       |        |       |  | 82,15           | 82,15 | Terkait langsung dengan masyarakat |        |       |                                | 166.905.362.556,00 | 166.905.362.556 | BA/PPEDA    | DIKIBUD       |
|    |      |              | Pendidik usia sekolah menyelesaikan pembelajaran pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif.       | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.   | 100  | Peningkatan infrastruktur dasar pendidikan dan Peningkatan kualitas mutu pendidikan | Angka        | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.          |      |       |        |       |  | 100             | 100   | Terkait langsung dengan masyarakat |        |       |                                | 166.905.362.556    | 166.905.362.556 | BA/PPEDA    | DIKIBUD       |
|    |      |              | Pendidik usia sekolah menyelesaikan pembelajaran pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif.       | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.   | 99,95  | Peningkatan infrastruktur dasar pendidikan dan Peningkatan kualitas mutu pendidikan | Angka        | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.          |      |       |        |       |  | 99,95           | 99,95 | Terkait langsung dengan masyarakat |        |       |                                | 166.905.362.556    | 166.905.362.556 | BA/PPEDA    | DIKIBUD       |
|    |      |              | Pendidik usia sekolah menyelesaikan pembelajaran dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif.                  | Rata-rata lama sekolah penduduk umur 215 tahun  | 7,41   | Peningkatan infrastruktur dasar pendidikan dan Peningkatan kualitas mutu pendidikan | Angka        | Rata-rata lama sekolah penduduk umur 215 tahun             |      |       |        |       |  | 7,41            | 7,41  | Terkait langsung dengan masyarakat |        |       |                                | 30.698.795.917     | 30.698.795.917  | BA/PPEDA    | Dinas PERKIMH |
|    |      |              | Masih rendahnya persentase cakupan pelayanan akses air minum layak yang ada di Kabupaten Sambas, yakni masih sebesar 63,71%.  | Tercapainya persentase jumlah rumah tangga penerima manfaat akses air minum layak sesuai target RRYM sebesar 63,72% di Tahun 2024 | Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat Akses Air Minum Layak | Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat Akses Air Minum Layak                          | Rumah Tangga | Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat Akses Air Minum Layak |      |       |        |       |  | 4.632           | 4.632 | Terkait langsung dengan masyarakat |        |       |                                | 30.698.795.917     | 30.698.795.917  | BA/PPEDA    | Dinas PERKIMH |



| No | Tema | Permasalahan  | Sesuai  | Indikator  | Target   | Rencana Aksi   | Output  |  |      |       |        | Target |                                    |                                    |             |             | Jenis Kegiatan<br>Aksi (terkait/ tidak<br>terkait langsung<br>dengan<br>masyarakat/<br>stakeholders<br>utama) | Jumlah Anggaran |  |  |                                    |  | Unit/ Satuan Kerja Pelaksanaan |
|----|------|---|---|--|--|--|---|--|------|-------|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---|-----------------|--|--|------------------------------------|--|--------------------------------|
|    |      |   |   |  |  |  | Satuan  | Indikator  | TW I | TW II | TW III | TW IV  | Total                              | TW I                               | TW II       | TW III      |   | TW IV           | Total  | Koordinator  | Pelaksana                          |  |                                |
|    |      | Kurangnya kemampuan koperasi untuk memiliki peran kritis dalam usaha dan inovasi usaha. Terbatasnya informasi/jaringan pemasaran yang akses permodalan bagi koperasi. Masih lemahnya jaringan distribusi pemasaran produk | Meningkatnya Permodalan dan Pengembangan Perkoperasian  | Jumlah SDM yang Berencana Pengembangan Perkoperasian | 120 orang  | Peningkatan dan Pengembangan Usaha serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | orang   | Jumlah SDM yang Berencana Pengembangan Perkoperasian | 0    | 60    | 60     | 0      | 120                                | Terkait langsung dengan masyarakat | 182.319.138 | 12.733.595  | 102.716.292   | 18.589.519      | 316.358.544  | BAPPEDA  | UKM, Perindustrian dan Perdagangan |  |                                |
|    |      | Meningkatnya Permodalan dan Pengembangan Perkoperasian  | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pengembangan Kelembagaan, Permodalan, Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi. | 78 unit usaha  | Pembudayaan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pengembangan Kelembagaan, Permodalan, Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi. | Unit Usaha   | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pengembangan Kelembagaan, Permodalan, Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi. | 20   | 20   | 19    | 20     | 79     | Terkait langsung dengan masyarakat | 18.779.632                         | 49.297.876  | 88.291.039  | 13.935.317  | 170.303.864     | BAPPEDA  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |                                    |  |                                |
|    |      | Meningkatnya Permodalan dan Pengembangan Perkoperasian  | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Memiliki Permodalan  | 10 Unit Usaha  | Realisasi Koordinasi dan Sinergi Usaha Mikro   | Unit Usaha   | Jumlah Usaha Mikro yang Memiliki Permodalan   | 5  | 5    | 5     | 5      | 10     | Terkait langsung dengan masyarakat | 15.317.145                         | 38.574.405  | 6.450.000   | 60.341.550  | BAPPEDA         | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |  |                                    |  |                                |
|    |      | Meningkatnya Permodalan dan Pengembangan Perkoperasian  | Jumlah Unit Usaha Mikro yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro   | 228  | Pembudayaan kelembagaan potensi usaha pengembangan usaha mikro   | Unit Usaha   | Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pendampingan Terhadap Usaha Mikro   | 60   | 60   | 54    | 54     | 228    | Terkait langsung dengan masyarakat | 4.245.643                          | 85.025.979  | 101.741.278 | 9.881.000   | 200.500.000     | BAPPEDA  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |                                    |  |                                |
|    |      | Meningkatnya Permodalan dan Pengembangan Perkoperasian  | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinergisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pembudayaan Usaha Mikro   | 50   | Koordinasi dan Sinergisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pembudayaan Usaha Mikro  | orang  | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinergisasi.   | 10   | 10   | 15    | 15     | 50     | Terkait langsung dengan masyarakat | 59.680.822                         | 39.681.726  | 52.472.382  | 29.946.420  | 181.781.350     | BAPPEDA  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |                                    |  |                                |
|    |      | Meningkatnya Permodalan dan Pengembangan Perkoperasian  | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi   | 25 Unit Usaha  | Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil  | Unit Usaha   | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi   | 25   |      |       |        | 25     | Terkait langsung dengan masyarakat | 41.383.948                         | 9.351.052   |             |   | 50.735.000      | BAPPEDA  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |                                    |  |                                |
|    |      | Meningkatnya Permodalan dan Pengembangan Perkoperasian  | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi   | 5 Unit Usaha   | Facilitasi Pengaturan Barang/Jasa Pemerintah   | Unit Usaha   | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi   | 5  |      |       |        | 5      | Terkait langsung dengan masyarakat | 31.891.335                         | 5.100.175   |             |   | 36.991.500      | BAPPEDA  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |                                    |  |                                |
|    |      | Meningkatnya Permodalan dan Pengembangan Perkoperasian  | Jumlah SDM yang Membantu Pengembangan Usaha Mikro dan Kelembagaan   | 30 Orang   | Peningkatan dan Pengembangan Usaha serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kelembagaan usaha Permodalan dan Pelakikan  | Orang  | Jumlah SDM yang Membantu Pengembangan Usaha Mikro dan Kelembagaan   | 30   |      |       |        | 30     | Terkait langsung dengan masyarakat | 78.559.932                         | 76.588.603  | 140.881.400 | 4.136.805   | 299.946.740     | BAPPEDA  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |                                    |  |                                |
|    |      | Meningkatnya Permodalan dan Pengembangan Perkoperasian  | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produktif dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi  | 100 Unit Usaha                                       | Produktif dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi   | Unit Usaha   | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produktif dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi  | 100  |      |       |        | 100    | Terkait langsung dengan masyarakat | 13.568.296                         | 297.303.949 | 161.377.655 | 11.892.000  | 484.143.900     | BAPPEDA  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |                                    |  |                                |



| No | Tema  | Permasalahan   | Sesaran   | Indikator   | Target      | Rencana Aksi   | Output       |   | Target |        |        |        |        | Jenis Kegiatan<br>asar (terkait/ tidak<br>terkait langsung<br>dengan masyarakat/<br>stakeholders<br>utama) | Jumlah Anggaran                          |               |               |               |                                    | Unit/Setoran Kerja Pelaksanaan                 |  |   |
|----|---|--|---|---|-------------|--|--------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|--|--|---|
|    |   |  |   |   |             |  | Sekuan       | Indikator   | TW I   | TW II  | TW III | TW IV  | Total  |  | TW I                                     | TW II         | TW III        | TW IV         | Total                              |  | Koordinator                                    | Pelaksana   |
| 2  | Peningkatan Investasi                             | Mifat investasi di daerah masih belum optimal          | Meningkatkan jumlah investor yang berinvestasi di daerah                | Persentase Peningkatan Jumlah Investor  | 8           | Mengikuti event promosi investasi tingkat Nasional dan Propinsi  | Investor     | Jumlah investor yang berinvestasi di daerah   | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 8  | Terkait langsung dengan masyarakat       | 29.250.056,00 | 29.250.056,00 | 29.250.056,00 | 29.250.056,00                      | 117.000.224                                    | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                      |
|    |   |  |   |   |             |  | Peta         | Jumlah Peta Potensi Investasi digital   | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1  | 1  | 1             | 1             | 1             | 1                                  | Terkait langsung dengan masyarakat             | -  | -   |
| 3  | Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Stunting) | Belum optimalnya peningkatan nilai realisasi investasi | peningkatan peryerapan tenaga kerja dan peningkatan perekonomian daerah | Persentase peningkatan nilai realisasi investasi                                      | 10          | Optimalisasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek terkait LKPM     | Persentase   | Peningkatan Nilai Realisasi Investasi   | 2      | 2      | 3      | 3      | 3      | 10   | Terkait langsung dengan masyarakat       | 120.667.430   | 120.667.430   | 120.667.430   | 120.667.430                        | 482.669.718                                    | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                      |
|    |   |  |   |   |             |  | Rapat        | Rapat Fasilitas Penyelidikan Pemusatan  | 2      | 2      | 3      | 2      | 7      | 18.737.760   | 18.737.760                               | 18.737.760    | 18.737.760    | 56.213.280    | Dinas Penanaman Modal dan PTSP     | Dinas Pertanian dan KP, Dinas Perkim LH, Dinas | Dinas Pertanian dan KP, Dinas Perkim LH, Dinas |   |
|    |   |  |   | Meningkatkan pengendalian penduduk dan kualitas keluarga                              | 1           | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Stunting                | Paket        | Jumlah Sistem Informasi   | 1      | 1      | 1      | 1      | 2      | Tidak terkait langsung dengan masyarakat   | -  | -             | 30.000.000    | -             | 30.000.000                         | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB    |   |
|    |   |  |   |   |             |  | Paket        | Jumlah kegiatan P2L yang dilaksanakan   | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10   | 10                                       | 10            | 10            | 10            | Terkait langsung dengan masyarakat | 14.250.000                                     | 569.853.480                                    | 21.749.904  |
|    |   |  |   | Meningkatkan capaian kinerja perencanaan bidang pemertintahan dan pembangunan manusia | 100 persen  | Koordinasi Kecamatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Laporan      | Jumlah Laporan Pengawasan Stunting  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1  | Tidak terkait langsung dengan masyarakat | -             | -             | 153.002.277   | -                                  | 153.002.277                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB    | Badan Penanaman Perumahan, PA, Daerah               |
|    |   |  |   |   |             |  | Rumah Tangga | Jumlah Rumah Tangga Pemeratah Meman Akses Abi Munim Layak   | 4.632  | 4.632  | 4.632  | 4.632  | 4.632  | 4.632  | 4.632                                    | 4.632         | 4.632         | 4.632         | Terkait langsung dengan masyarakat | -  | -  | 30.698.795.917                                      |
|    |   | Pelaksanaan perlindungan sosial masih sangat terbatas  | Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial                               | Persentase DTKS yang mendapatkan perlindungan sosial                                  | 57,5 Persen | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                 | Keluarga     | Jumlah Keluarga Pemeratah Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Kabupaten/Kota | 21.521 | 21.521 | 21.521 | 21.521 | 21.521 | 21.521   | Terkait langsung dengan masyarakat       | 142.196.304   | 142.196.304   | 142.196.304   | 142.196.304                        | 568.785.219                                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB    | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB |
|    |   |  |   |   |             |  | Orang        | Jumlah Orang Mendapat Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota                                      | 65     | 65     | 65     | 65     | 65     | 65   | 65                                       | 65            | 65            | 65            | Terkait langsung dengan masyarakat | -  | -  | 49.565.196  |



| No | Tema | Permasalahan  | Sasaran                          | Indikator  | Target      | Rencana Aksi  | Output  |  |      |       |        | Jenis Kegiatan<br>Aksi (kerjak/blank<br>teknik langsung<br>dengan<br>masyarakat/<br>stakeholders<br>rtwsm) | Jumlah Anggaran |       |  |                                     |                | Unit/Satuan Kerja Pelaksanaan |                |                |               |  |  |
|----|------|---|----------------------------------|--|-------------|---|---------|--|------|-------|--------|--|-----------------|-------|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|
|    |      |   |                                  |  |             |   | Satuan  | Indikator  | TW I | TW II | TW III |  | TW IV           | Total | Terkecil langsung<br>dengan masyarakat | TW I                                | TW II          |                               | TW III         | TW IV          | Total         | Koordinator                            | Pelaksana  |
|    |      | Masih terdapat potensi terjadinya kekurangan bahan pangan di tingkat Rumah Tangga dan Lokal/ Daerah | Meninggiakan Ketersediaan Pangan | Jumlah Keluarga yang mendapat Pangan Ketahanan Pangan  | 40 Keluarga | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   | Paket   | Jumlah bantuan Benih Sayuran dan Buah  | 1    | 7     | 1      | 1  | 1               | 1     | 7                                      | Terkecil langsung dengan masyarakat | 126.506.211,00 | 153.944.645,00                | 60.138.053,00  | 26.246.631,00  | 366.835.540   | Bagian Perkeronomian Setda Kab. Sambas | Dinas pertanian Dan Ketahanan Pangan               |
|    |      | Masih terdapat potensi terjadinya kekurangan pangan di tingkat Rumah Tangga dan Lokal/ Daerah       | Meninggiakan Ketersediaan Pangan | Jumlah keluarga yang mendapat Pangan Ketahanan Pangan  | 20 Ton      | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota  | Ton     | Badania Pengadaan Bensu Cadangan Pangan Daerah   | 10   | 10    |        |  |                 |       | 10                                     | Terkecil langsung dengan masyarakat | 37.940.090,00  | 214.549.648,00                | 70.121.484,00  | 65.188.576,00  | 387.769.798   | Bagian Perkeronomian Setda Kab. Sambas | Dinas pertanian Dan Ketahanan Pangan               |
|    |      | Masih terdapat potensi terjadinya kekurangan pangan di tingkat Rumah Tangga dan Lokal/ Daerah       | Meninggiakan Ketersediaan Pangan | Jumlah Agen Barang kebutuhan Pokok dan Penting untuk memenuhi ketersediaan barang yang di monotoring | 1 Laporan   | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakannya n konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                      | Paket   | Benih Sayur dan Bihit Buah Lada Sekolah Rumah Anak dan Sekolah Hijau, Pengadaan Gerakan Tanam  | 1    | 1     |        |  |                 |       | 1                                      | Terkecil langsung dengan masyarakat | 78.561.268,00  | 55.927.096,00                 | 242.011.879,00 | 141.001.411,00 | 517.501.654   | Bagian Perkeronomian Setda Kab. Sambas | Dinas pertanian Dan Ketahanan Pangan               |
|    |      | Masih terdapat potensi terjadinya kekurangan pangan di tingkat Rumah Tangga dan Lokal/ Daerah       | Meninggiakan Ketersediaan Pangan | Jumlah pasar yang dibenahi harga barang kebutuhan pokok dan penting                                  | 12 Laporan  | Pemanfaatan Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | Laporan | Jumlah Laporan Pemanfaatan Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | 3    | 3     | 3      | 3  | 3               | 12    | 3                                      | Terkecil langsung dengan masyarakat | 29.310.000,00  | 36.934.707,00                 | 23.426.080,00  | 28.710.000,00  | 118.380.787   | Bagian Perkeronomian Setda Kab. Sambas | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      | Masih terdapat potensi terjadinya kekurangan pangan di tingkat Rumah Tangga dan Lokal/ Daerah       | Meninggiakan Ketersediaan Pangan | Persentase Pupuk dan Pestisida yang disalurkan/ Diambil yang di monitoring.                          | 12 Laporan  | Pengawasan Pengaturan dan Pengaturan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi   | Laporan | Jumlah Laporan Pengawasan Pengaturan dan Pengaturan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Persentase Minimal 90%                                       | 3    | 3     | 3      | 3  | 3               | 12    | 3                                      | Terkecil langsung dengan masyarakat | 5.600.000,00   | 9.171.000,00                  | 5.675.000,00   | 10.181.279,00  | 30.627.279    | Bagian Perkeronomian Setda Kab. Sambas | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      | Masih terdapat potensi terjadinya kekurangan pangan di tingkat Rumah Tangga dan Lokal/ Daerah       | Meninggiakan Ketersediaan Pangan | Jumlah pelaksanaan operasi pasar   | 27 Kali     | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota  | Laporan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota  | 9    | 5     | 9      | 4  | 1               | 27    | 9                                      | Terkecil langsung dengan masyarakat | 761.887.600,00 | 138.621.000,00                | 165.672.522,00 | 218.397.044,00 | 1.284.578.166 | Bagian Perkeronomian Setda Kab. Sambas | Dinas pertanian Dan Ketahanan Pangan               |
|    |      | Masih terdapat potensi terjadinya kekurangan pangan di tingkat Rumah Tangga dan Lokal/ Daerah       | Meninggiakan Ketersediaan Pangan | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi keragaman Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota                         | 1 Laporan   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Keragaman Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota   | dokumen | Peta keragaman dan Keragaman Pangan  | 1    | 1     |        |  |                 |       | 1                                      | Terkecil langsung dengan masyarakat | 6.106.481,00   |                               | 25.377.977,00  | 18.515.400,00  | 49.999.858    | Bagian Perkeronomian Setda Kab. Sambas | Dinas pertanian Dan Ketahanan Pangan               |

| No | Tema | Permasalahan   | Sesaran                         | Indikator   | Target       | Rencana Aksi  | Output   |  | Target |       |        |       |       | Jenis Kegiatan<br>akur/ Terukur/ Think<br>dengan<br>masyarakat/<br>stakeholders<br>(ukuran) | Jumlah Anggaran                    |                                    |                                    |                |               | Unit/ Satuan Kerja/ Pelaksanaan |                |                |             |               |                                      |                                      |                                       |  |
|----|------|--|---------------------------------|---|--------------|---|----------|--|--------|-------|--------|-------|-------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
|    |      |  |                                 |   |              |   | Satuan   | Indikator  | TW I   | TW II | TW III | TW IV | Total |   | TW I                               | TW II                              | TW III                             | TW IV          | Total         |                                 | Koordinator    | Pelaksana      |             |               |                                      |                                      |                                       |  |
|    |      | Masih terdapat potensi terdapat hambatan distribusi barang | Minggu Distribusi Barang        | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam Satu (1) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia | 4 Unit       | Program Penyelenggaraan Laju Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)   | Unit     | Presentase Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam Satu (1) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia |        | 25    |        |       | 4     |   | 4                                  | 25                                 | Terikat langsung dengan masyarakat |                |               |                                 |                | 2.533.207.850  | 391.781.435 | 391.781.435   | Bagian Perencanaan Setda Kab. Sambas | DISHUB                               |                                       |  |
|    |      |  |                                 | Jumlah Pelembutan Sungai dan Danau yang Dibangun  | 25 Unit      | Pembangunan Pelembutan Sungai dan Danau   | Unit     | Presentase Jumlah Pelembutan Sungai dan Danau yang Dibangun  |        |       |        |       | 25    |   | 25                                 | Terikat langsung dengan masyarakat |                                    |                |               |                                 |                | 2.533.207.850  |             |               | 146.276.328,00                       | 146.276.328                          | Bagian Perencanaan Setda Kab. Sambas  | DISHUB   |
|    |      |  |                                 | Jumlah Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelembutan Sungai dan Danau   | 1 Unit       | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelembutan Sungai dan Danau  | unit     | Presentase Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelembutan Sungai dan Danau  |        | 1     |        |       | 1     |   | 1                                  | Terikat langsung dengan masyarakat |                                    |                |               |                                 |                | 1.061.433.190  |             |               | 124.330.928                          | 124.330.928                          | Bagian Perencanaan Setda Kab. Sambas  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |  |                                 | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi  | 13 Unit      | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Unit     | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan   | 3      | 3     | 4      | 3     | 13    |   | 13                                 | Terikat langsung dengan masyarakat | 382.532.440,00                     | 635.519.563,00 | 32.228.184,00 |                                 |                | 11.153.003,00  |             |               | 5.820.678,00                         | 187.727.070                          | Bagian Perencanaan Setda Kab. Sambas  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |  |                                 | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | 20 Unit      | Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Unit     | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | 10     | 10    | 25     | 25    | 20    |   | 20                                 | Terikat langsung dengan masyarakat | 58.850.000,00                      | 50.667.125,00  | 8.998.125,00  |                                 |                | 33.116.452,00  |             |               | 284.054.812                          | 284.054.812                          | Bagian Perencanaan Setda Kab. Sambas  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |  |                                 | Jumlah Pedagang yang dibina   | 100 Pedagang | Pembinaan dan Pengendalian Pedagang Sarana Perdagangan  | Pedagang | Jumlah Pembinaan dan Pengendalian kepada Pedagang Sarana Perdagangan   | 25     | 25    | 25     | 25    | 100   |   | 100                                | Terikat langsung dengan masyarakat | 160.871.358,00                     | 54.015.404,00  | 36.660.998,00 |                                 |                | 20.740.202,00  |             |               | 187.727.070                          | 187.727.070                          | Bagian Perencanaan Setda Kab. Sambas  | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
|    |      |  |                                 | Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang ditugaskan kapasitas SDM  | 200 Pedagang | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  | Pedagang | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Perdagangan  | 50     | 50    | 50     | 50    | 200   |   | 200                                | Terikat langsung dengan masyarakat | 82.020.996,00                      | 50.268.376,00  | 34.697.496,00 |                                 |                | 545.860.000,00 |             |               | 1.115.860.000                        | 1.115.860.000                        | Bagian Perencanaan Setda Kab. Sambas  | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kewan              |
|    |      | Masih terdapat potensi terdapat hambatan distribusi barang | Minggu stok komoditas perikanan | Jumlah produksi perikanan (Tangkap, Budidaya dan Pengolah   | 24.370 ton   | Penyediaan Prasana Usaha Perikanan Tangkap  | Unit     | Jumlah Prasana Usaha yang Tersedia   | 20     | 25    | 32     | 77    |       | 77  | Terikat langsung dengan masyarakat |                                    | 250.000.000,00                     | 320.000.000,00 |               |                                 | 545.860.000,00 |                |             | 1.115.860.000 | 1.115.860.000                        | Bagian Perencanaan Setda Kab. Sambas | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kewan |  |
|    |      |  |                                 | Jumlah Usaha Perikanan Tangkap  | Unit         | Penjagaan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                  | Unit     | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota   | 2      | 2     | 3      | 7     |       | 7   | Terikat langsung dengan masyarakat |                                    | 200.000.000,00                     | 200.000.000,00 |               |                                 | 234.500.000,00 |                |             | 634.500.000   | 634.500.000                          | Bagian Perencanaan Setda Kab. Sambas | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kewan |  |
|    |      |  |                                 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                               | Ton          | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Ton      | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                   | 48     | 50    | 52     | 55    | 205   |   | 205                                | Terikat langsung dengan masyarakat | 50.000.000,00                      | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |                                 |                | 52.088.690,00  |             |               | 202.088.690                          | 202.088.690                          | Bagian Perencanaan Setda Kab. Sambas  | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kewan              |

